

**SKRIPSI**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
DISPARITAS PENDAPATAN REGIONAL DI PROVINSI  
ACEH**



**Disusun Oleh:**

**RISKI OKTAVRIANSYAH  
NIM. 180604001**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023M / 1445H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Riski Oktavriansyah

NIM : 180604001

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Juli 2023

Yang Menyatakan,



Riski Oktavriansyah

**PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
DISPARITAS PENDAPATAN REGIONAL DI PROVINSI  
ACEH**

Disusun Oleh:

Riski Oktavriansyah

NIM. 180604001

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program

Studi Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muhammad Adnan, SE., M. Si

NIP. 197204281999031005

Marwiyati, S.E., M.M

NIP. 197404172005012002

Ketua Prodi Ilmu Ekonomi

*fus*

Cut Dian Fitri, M.Si., Ak. CA

NIP.1972042820050110003

## PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

### Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Disparitas Pendapatan Regional di Provinsi Aceh

Riski Oktavriansyah  
NIM. 180604001

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus serta Diteima Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ilmu Ekonomi

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 26 Juli 2023 M  
5 Muharram 1445 H  
Banda Aceh  
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

Dr. Muhammad Adnan, S.E., M.Si  
NIP. 197204281999031005

Penguji I

Dr. Jarjah Abu Bakar, S.E. M.Si  
NIP. 197508282005012002

Sekretaris

Marwiyati, S.E., M.M  
NIP. 197404172005012002

Penguji II

Evy Iskandar S.E. M.Si. Ak.Ca CPA  
NIDN. 200024026901

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Hafas Furgani, M.Ec.  
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

## FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Riski Oktavriansyah  
NIM : 180604001  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi  
E-mail : [180604001@student.ar-raniry.ac.id](mailto:180604001@student.ar-raniry.ac.id)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir

KKU

Skripsi .....

Yang berjudul

### **Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Disparitas Pendapatan Regional di Provinsi Aceh**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendisminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

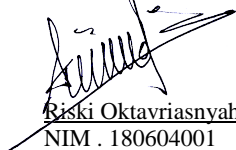
UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya,

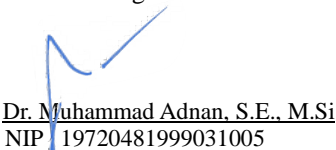
Dibuat di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 29 Juli 2023

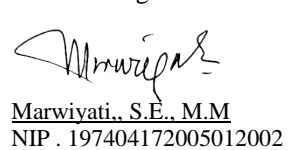
Penulis

  
Riski Oktavriansyah  
NIM . 180604001

Pembimbing I

  
Dr. Muhammad Adnan, S.E., M.Si  
NIP 19720481999031005

Pembimbing II

  
Marwiyati., S.E., M.M  
NIP . 197404172005012002

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Shalawat berserta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari alam *jahiliyah* (kebodohan) ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan izin Allah SWT serta bantuan dari semua pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DISPARITAS PENDAPATAN REGIONAL DI PROVINSI ACEH**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Skripsi ini belum mencapai tahap kesempurnaan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada agar skripsi ini dapat tersusun sesuai harapan.

Alhamdulillah skripsi ini telah selesai, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara moral maupun secara materil. Penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi, dan Ana Fitria, SE., M.Sc selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi.
3. Hafiih Maulana S.P., S.H.I, M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah memudahkan rangkaian proses mulai dari pengajuan judul sampai pencetakan skripsi.
4. Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si selaku pembimbing I dan Marwiyati SE, M.M. selaku pembimbing II yang kesabarannya dan juga begitu banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Dr. Jariah Abu Bakar, SE., M.Si selaku penguji I dan Evy Iskandar SE, M.Si. Ak, CA, CPA selaku penguji II yang kesabarannya dan juga begitu banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Cut Elfida, S.H.I., M.A. selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Ekonomi. Seluruh dosen, karyawan, serta staf akademik maupun tata usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu dan memberikan pelayanan kepada penulis.

7. Keluarga yang sangat penulis cintai, Ayahanda Ismadi, Ibunda Sukarsih, Abang Andrian Aghista, dan Adik Risma Kageubrina yang selalu mendoakan dan memeberikan semangat serta motivasi kepada penulis hingga skripsi ini selesai.
8. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2018 terutama untuk Andri Febriyanda, Yori NovilaYusda, Zefrizal Muharram, Hafiz Aulia, Siti Afifa, Rossy Ammalia dan Ike Irviana Putri yang turut membantu serta memberikan saran-saran serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Para sahabat yang selalu memberikan dukungan materil dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Teman-teman organisasi Senat Mahasiswa SEMA Febi UIN Ar-Raniry yang turut memberikan saran-saran dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran atau ide-ide yang bersifat membangun dan bermanfaat bagi semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama Ilmu Ekonomi dan masyarakat terkait.



Semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis hanya dapat mendoakan semoga diberikan umur yang panjang, kesehatan dan juga amalnya diterima disisi Allah SWT sebagai amal yang mulia Amin Yarabbal 'Alamin.

Penulis

Riski Oktavriansyah



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor:  
158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u 1987

### 1. Kosonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ž	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'

14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

## 2. Vocal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vocal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf

ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

*kaifa*: كيف

*haula*: هول

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
آ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
ئ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

*qāla*: ق ا ل

*ramā*: ر م ي

*qīla*: ق ي ل

*yaqūlu*: ي ق و ل

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

*raudah al-atfal/ raudatul atfal* : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

*al-Madinah al-Munawwarah/  
al-Madinatul Munawwarah* : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

*Talhah* : طَلْحَةَ

## ABSTRAK

Nama : Riski Oktavriansyah  
NIM : 180604001  
Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi  
Judul : Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Disparitas Pendapatan Regional Di Provinsi Aceh  
Pembimbing I : Dr. Muhammad Adnan, S.E., M.Si  
Pembimbing II : Marwiyati S.E, M.M  
Kata Kunci : Disparitas Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Dana alokasi Khusus

Disparitas atau ketimpangan terjadi dikarenakan perbedaan karakteristik pada setiap daerah baik dari pusat pertumbuhan ekonomi, sumber daya manusia, maupun sumber daya modal dan lainnya, hal ini menyebabkan tingkat Disparitas di Provinsi Aceh dalam beberapa tahun terakhir semakin melebar dalam gini rasio semakin meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh PE, IPM dan DAK terhadap Disparitas Pendapatan di Provinsi Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder setiap kabupaten/kota dari tahun 2011-2022. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil dari penelitian ini adalah PE tidak berpengaruh terhadap Disparitas Pendapatan, IPM memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Disparitas Di Provinsi Aceh Tahun 2011-2022, DAK tidak berpengaruh terhadap Disparitas Pendapatan Di Provinsi Aceh tahun 2011-2022. Diharapkan kepada pemerintah agar memaksimalkan dan membuat kebijakan yang berkaitan dengan variabel PE, IPM dan DAK agar dapat menanggulangi permasalahan disparitas yang terjadi di Provinsi Aceh.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.5 Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>16</b>
2.1 Disparitas Pendapatan .....	16
2.1.1 Definisi Disparitas Pendapatan.....	16
2.1.2 Teori Disparitas Pendapatan.....	16
2.1.3 Penyebab dan Kebijakan Disparitas .....	17
2.1.4 Indikator Disparitas Pendapatan.....	20
2.2 Pertumbuhan Ekonomi .....	22
2.2.1 Definisi Pertumbuhan Ekonomi.....	22
2.2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi .....	22
2.2.3 Faktor-faktor yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi .....	23
2.2.4 Indikator dan Tolak Ukur Pertumbuhan Ekonomi.....	25
2.3 Indeks Pembangunan Manusia .....	27
2.3.1 Definisi Indeks Pembangunan Manusia .....	27
2.3.2 Teori Indeks Pembangunan Manusia .....	27

2.3.3	Komponen dan Indikator Indeks Pembangunan Manusia .....	28
2.4	Dana Alokasi Khusus .....	29
2.4.1	Definsi Dana Alokasi Khusus .....	29
2.4.2	Faktor-faktor yang Mendukung Dana Alokasi Khusus .....	30
2.4.3	Perhitungan Dana Alokasi Khusus .....	31
2.5	Penelitian Terkait.....	32
2.6	Pengaruh Antar Variabel .....	35
2.6.1	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Disparitas Pendapatan .....	35
2.6.2	Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Disparitas Pendapatan .....	36
2.6.3	Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Disparitas .....	36
2.7	Kerangka Berpikir .....	37
2.8	Hipotesis .....	38
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>40</b>
3.1	Jenis Penelitian .....	40
3.2	Jenis dan Sumber Data .....	40
3.3	Sampel Penelitian .....	41
3.4	Variabel Penelitian .....	41
3.4.1	Klasifikasi Variabel.....	41
3.4.1	Definisi Operasional Variabel .....	41
3.5	Teknik Analisis Data .....	43
3.5.1	Model dan Analisis Regresi Data Panel.....	43
3.5.2	Model Estimasi Regresi Data Panel .....	44
3.5.3	Pemilihan Model Regresi Data Panel.....	48
3.6	Pengujian Hipotesis Penelitian .....	50
3.6.1	Uji Hipotesis Parsial (Uji t) .....	50
3.6.2	Uji Hipotesis Simultan (Uji F) .....	51
3.6.3	Koefisien Determinasi $R^2$ .....	51
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
4.1	Deskripsi Penelitian .....	53
4.1.1	Disparitas Penelitian.....	53
4.1.2	Pertumbuhan Ekonomi .....	55
4.1.3	Indeks Pembangunan Manusia .....	56



4.1.4 Dana Alokasi Khusus .....	58
4.2 Hasil Analisis Regresi Data Panel .....	59
4.3.1 Hasil Uji Chow .....	59
4.3.2 Hasil Uji Hausman .....	60
4.3 Hasil Analisis Regresi Data Panel <i>Fixed Effect Model</i> (FEM) .....	62
4.4 Hasil Uji Signifikansi (Uji T) .....	64
4.5 Hasil Uji Simultan (Uji F) .....	65
4.6 Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	66
4.7 Pembahasan Penelitian .....	67
4.7.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Disparitas Pendapatan di Provinsi Aceh .....	67
4.7.2 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Disparitas Pendapatan di Provinsi Aceh .....	68
4.7.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Disparitas Pendapatan Regional di Provinsi Aceh .....	69
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>71</b>
5.1 Kesimpulan .....	71
5.2 Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>78</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>93</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	32
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel .....	41
Tabel 4.1 Hasil Uji Chow .....	60
Tabel 4.4 Hasil Uji Hausman .....	61
Tabel 4.5 Hasil Regresi Data Panel Fixed Effect Model (FEM) .....	62



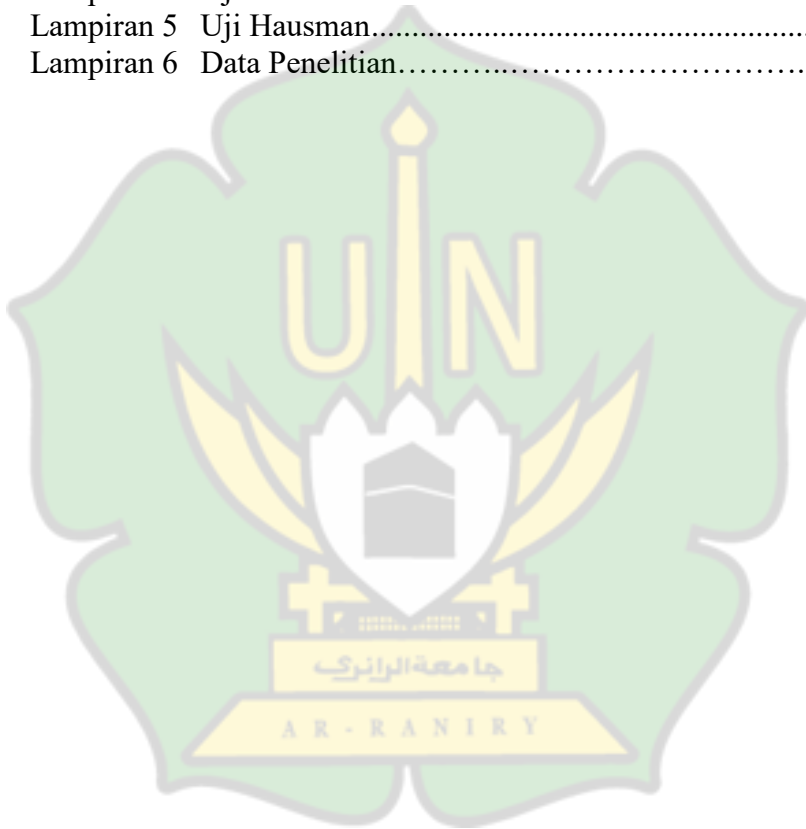
## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Perkembangan Rasio Gini Provinsi Aceh .....	3
Grafik 1.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh .....	5
Grafik 1.2	Perkembangan IPM Provinsi Aceh .....	7
Grafik 1.2	Perkembangan DAK Provinsi Aceh .....	9
Grafik 4.1	Indeks Gini Kabupaten/Kota Provinsi Aceh .....	53
Grafik 4.2	Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Aceh .....	54
Grafik 4.3	Perkembangan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.....	56
Gambar 4.4	Perkembangan Dana Alokasi Khusus Kabupaten/Kota Provinsi Aceh .....	57



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Model Analisis <i>Common Effect Model</i> .....	77
Lampiran 2	Model Analisis <i>Fixed Effect Model</i> .....	78
Lampiran 3	Model Analisis <i>Random Effect Model</i> .....	79
Lampiran 4	Uji Chow .....	80
Lampiran 5	Uji Hausman.....	81
Lampiran 6	Data Penelitian.....	83



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Disparitas pendapatan telah menjadi persoalan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi sejumlah negara miskin dan berkembang. Banyak negara berkembang yang mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi namun tidak diikuti dengan pemerataan yang baik, di era 1960-an mulai para ekonom menyadari bahwa pertumbuhan yang tinggi hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan masalah kemiskinan, pembangunan dan pemerataan atau distribusi.

Disparitas pendapatan merupakan aspek yang umum terjadi pada suatu negara dalam konteks distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi, kelompok masyarakat berpendapatan sedang dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta masalah pembangunan ekonomi antardaerah yang tidak merata. Oleh sebab itu disparitas pendapatan selalu terjadi, baik di negara miskin, negara sedang berkembang, maupun negara maju. Hal yang membedakan di setiap daerah adalah dari perbedaan potensi yang dimiliki setiap daerah dalam mendorong proses pembangunan ekonomi di suatu daerah menjadi berbeda dan hal ini menjadi hambatan dalam proses pemerataan pembangunan ekonomi yang dikarenakan terkonsentrasinya suatu kegiatan perekonomian di

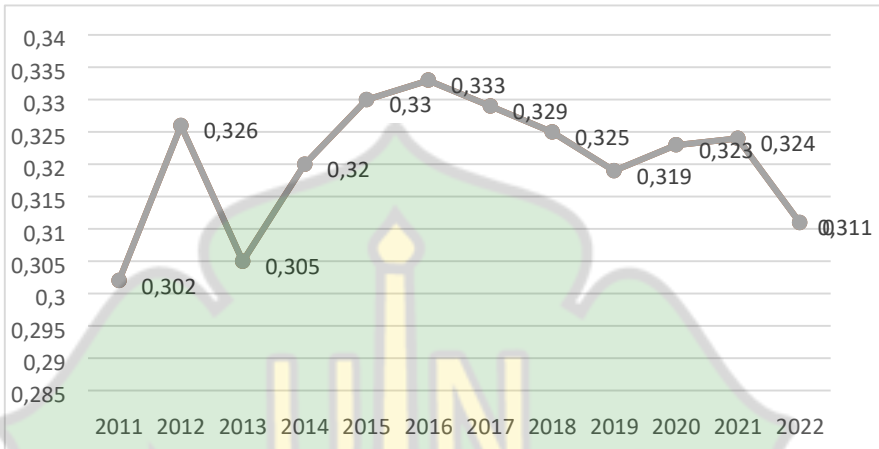
beberapa daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah, sehingga terdapat daerah yang maju dan daerah yang terbelakang (Sjafrijal, 2012).

Disparitas atau ketimpangan distribusi pendapatan akan menghambat pembangunan, karena berdampak negatif terhadap stabilitas ekonomi dan stabilitas politik di suatu negara. Tingginya ketimpangan distribusi pendapatan akan memperjauh kondisi ekonomi antara si kaya dan si miskin, sehingga menjadi tantangan terhadap pembangunan ekonomi di suatu wilayah atau daerah tersebut (Suryani & Woyanti, 2021).

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 34 provinsi dimana setiap provinsi memiliki kebijakan pembangunan yang berbeda-beda untuk membangun dan mengurangi tingkat ketimpangan atau disparitas maupun kemiskinan. Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang masuk dalam kategori provinsi termiskin dan tertinggi di pulau sumatera, dan provinsi Aceh pun memiliki karakteristik yang berbeda dengan provinsi yang lainnya, baik dari kandungan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari kondisi perkembangan gini rasio provinsi Aceh pada 12 tahun terakhir.

**Grafik 1.1**

**Perkembangan Rasio Gini Provinsi Aceh**



Sumber: BPS (2022)

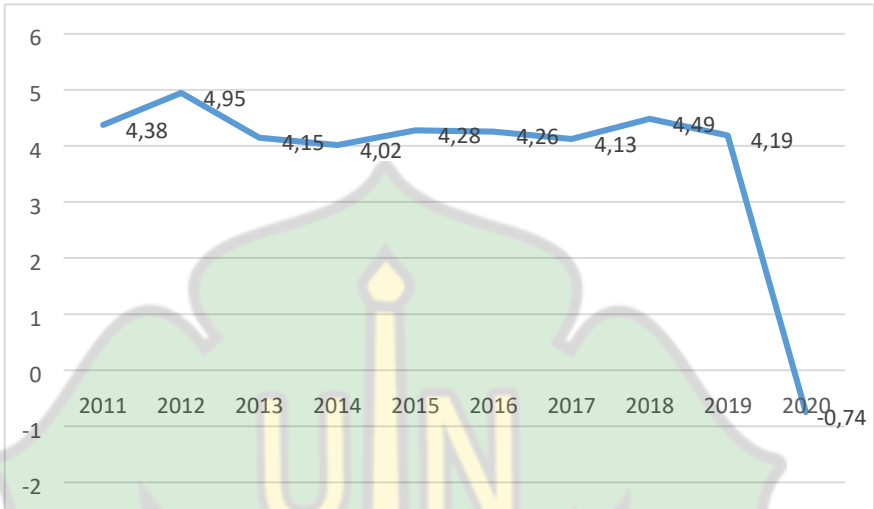
Berdasarkan grafik 1.1 menjelaskan bahwa dari tahun 2011 sampai dengan 2013 memiliki tren naik turun sebesar 0,301-0,328 kemudian pada tahun 2013 sampai dengan 2016 mengalami peningkatan indeks rasio gini sebesar 0,302-0,33, dan yang tertinggi terjadi pada 2016 dan pada tahun 2017, selanjutnya hingga tahun 2022 tren indeks gini mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena adanya pendapatan pada tiap-tiap daerah yang sangat berbeda, ada daerah yang potensial dengan pengelolaan asset daerah yang sangat optimal sehingga menyumbang pendapatan yang tinggi, sedangkan daerah lain dalam pengelolaan potensi daerah belum optimal sehingga pendapatan daerah masih sedikit diterima.

Salah satu faktor yang mempengaruhi disparitas pendapatan adalah pertumbuhan ekonomi. Hasil studi yang dilakukan oleh (Deysappriya, 2017) berkesimpulan bahwa peningkatan awal pertumbuhan ekonomi akan diikuti dengan tingginya ketimpangan distribusi pendapatan. Hasil studi tersebut memiliki persamaan dengan teori Kuznets yang digambarkan dalam kurva U terbalik yang menyatakan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi jangka panjang akan memungkinkan redistribusi yang rata dari kegiatan ekonomi di seluruh wilayah, dan akibatnya ketimpangan atau disparitas pendapatan perlahan akan berkurang.

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan taraf hidup masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa output regional. Proses ini menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat suatu daerah, meliputi peningkatan pendapatan riil, penurunan tingkat pengangguran serta memperbaiki distribusi pendapatan. Analisis pertumbuhan ekonomi regional, pertumbuhan ekonomi pada tingkat daerah lebih ditekankan pada pemanfaatan faktor produksi yang mempertimbangkan perbedaan karakteristik daerah dan unsur tata ruang (Syafrizal 2012).



**Grafik 1.2**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh**



Sumber: BPS (2022)

Berdasarkan gambar 1.2 kondisi pertumbuhan ekonomi dari tahun 2011 sampai dengan 2012 mengalami peningkatan sebesar 0,57 persen dan pada tahun berikutnya dari 2013 hingga 2019 berfluktuasi naik turun namun tren pertumbuhan ekonominya meningkat, dan pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh mengalami penurunan diangka -0,74 persen disebabkan karena pandemi covid-19.

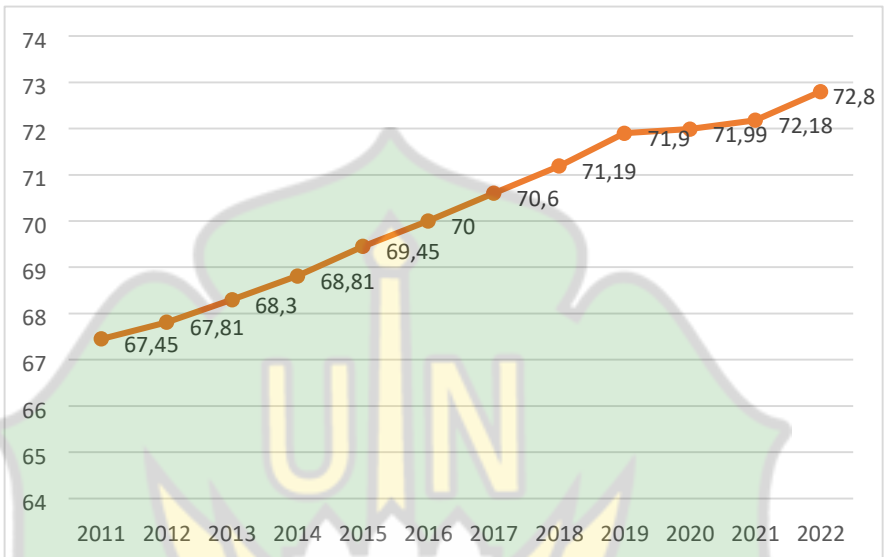
Fakta yang diperoleh dari data Badan Pusat Statistik (2018) menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari tahun ke tahun hanya berdampak pada tingkat nasional, bukan pada tingkat daerah. Sehingga menimbulkan ketimpangan antar wilayah

atau daerah di Indonesia, dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan tidak dapat menyelaraskan dengan masalah ketimpangan atau disparitas pendapatan. Hal ini terlihat pada tingkat ketimpangan di Indonesia yang diukur dengan Gini Ratio pada Maret 2018 tercatat sebesar 0,324, angka ini naik 0,004 dibandingkan kondisi Maret hingga September 2017 yang sebesar 0,320

Faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas pendapatan lainnya adalah perbedaan kondisi demografis. Hal ini berkaitan dengan letak geografis dan kualitas SDM yang ada di suatu wilayah atau daerah. Kualitas sumber daya manusia dapat diukur melalui IPM (Indeks Pembangunan Manusia), IPM merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia dan berguna untuk menentukan tingkat pembangunan suatu wilayah/negara, IPM adalah indeks yang paling akurat digunakan untuk menganalisis disparitas pendapatan daerah sebagai variabel untuk mempertimbangkan pembangunan sosial dan ekonomi sebagai alat ukur keberhasilan sumber daya manusia di suatu negara maupun daerah. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan taraf hidup yang layak. Berikut laju pertumbuhan IPM di Provinsi Aceh.

**Grafik 1.3**

**Perkembangan IPM Provinsi Aceh**



Sumber: BPS (2022)

Pada grafik di atas menunjukkan bahwa perkembangan indeks pembangunan manusia terjadi peningkatan pada setiap tahunnya yang terendah terjadi pada tahun 2011 sebesar 67,45 persen dan yang tertinggi terjadi pada tahun 2022 yang mencapai angka 72,8. dan memiliki rata-rata perkembangan IPM dari 2011 hingga 2022 sebesar 69,97.

Hasil penelitian (Lee & Lee, 2018) berkesimpulan peningkatan sumber daya manusia yang diukur dengan pencapaian pendidikan memiliki peran penting dalam mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan. Peningkatkan pendidikan yang merupakan

bagian dari *human capital* dapat meningkatkan pendapatan di masa yang akan datang. Pembangunan manusia di bidang pendidikan dan kesehatan akan mempengaruhi kemampuan menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga dapat memperkuat efek dari tingkat pendidikan dan kesehatan yang baik.

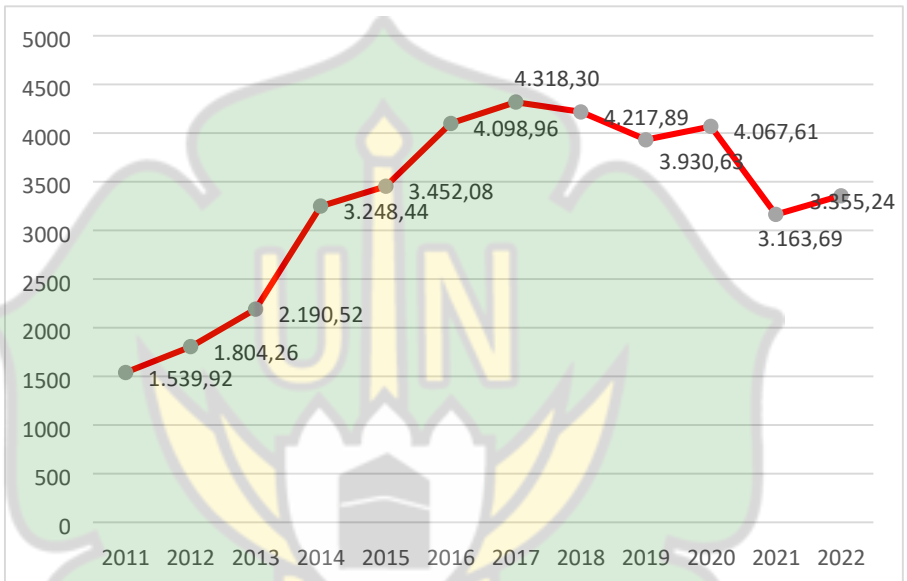
Faktor yang mempengaruhi disparitas pendapatan regional antar wilayah yang lainnya adalah Alokasi dana pembangunan yang dapat diperoleh dari pemerintah maupun swasta. Daerah yang memperoleh dana yang lebih besar akan cenderung memiliki ketimpangan yang jauh lebih rendah. Sebaliknya daerah yang memperoleh dana yang lebih rendah maka ketimpangan di daerah tersebut cenderung tinggi. Ketimpangan atau disparitas salah satu terjadi karena proses distribusi anggaran dari pusat ke daerah yang kurang efektif. Agar proses distribusi maka perlu dilakukan desentralisasi fiskal.

Menurut (Sari et al., 2021) Desentralisasi fiskal adalah proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih tinggi ke pemerintah yang lebih rendah atau rendah yang bertujuan untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintah dalam sistem pelayanan publik sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab birokrasi di Indonesia. Hal ini juga di dukung oleh (Tambunan 2018) Ketimpangan pendapatan tidak lepas dari kebijakan ekonomi khususnya kebijakan fiskal, seperti perpajakan serta pengalokasian dana, subsidi, kebijakan moneter atau perbankan, dan kebijakan

lainnya. Gambar berikut menunjukkan perkembangan Dana Alokasi Khusus di Provinsi Aceh.

**Grafik 1.4**

**Perkembangan Dana Alokasi Khusus Provinsi Aceh**



Sumber: BPS (2022)

Berdasarkan grafik 1.4 di atas perkembangan alokasi dana di provinsi Aceh mengalami tren peningkatan pada setiap tahunnya. Total alokasi dana provinsi Aceh dalam 1 dekade terakhir terendah terjadi pada tahun 2011 sebesar 1.539,92 milyar dan terjadi peningkatan tahun berikutnya hingga yang tertinggi pada tahun 2017 sebesar 4.318,30 milyar. Angka tersebut naik signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan kepada daerah dalam bentuk pembiayaan kebutuhan khusus menjadi prioritas nasional yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lain-lain. Distribusi dana alokasi khusus tersebut diberikan dalam bentuk dana transfer yang diharapkan dapat mengurangi disparitas pendapatan antar daerah. Namun dalam penelitian (Wardhana, dkk (2013) di temukan kondisi yang bertolak belakang, pemberian dana transfer yang seharusnya mengurangi disparitas pendapatan justru menyebabkan terjadinya ketimpangan semakin besar di setiap tahunnya.

Disparitas atau ketimpangan pendapatan terjadi ketika pendapatan yang diterima oleh semua kalangan masyarakat tidak merata dan ditentukan oleh tingkat pembangunan suatu daerah yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang kurang memanfaatkan adanya *property rights* pada daerah yang mempunyai potensi sumber daya melimpah dan alokasi dana yang tidak tepat sasaran. Disparitas pendapatan yang lebih terfokus pada distribusi pendapatan di seluruh kalangan masyarakat telah lama menjadi permasalahan dalam melakukan kegiatan pembangunan ekonomi yang terjadi di negara maju, negara berkembang maupun negara terbelakang.

Penelitian Gita dan Woyanti (2021) secara parsial menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Hasil ini tidak sesuai dengan hasil penelitian (Davtyan, 2016) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif

terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Hasil penelitian ini juga berbeda dengan penelitian Deyshappriya (2017) yang memiliki keselarasan dengan teori Kuznets, dimana peningkatan awal pertumbuhan ekonomi akan diikuti dengan ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi.

Dari hasil penelitian Lee & Lee (2018) yang menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dijelaskan bahwa pendidikan sebagai indikator IPM berperan penting dalam mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini juga sesuai dengan teori *Human Capital* yang menyatakan bahwa pendidikan mampu meningkatkan produktivitas seseorang sehingga bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan yang diperoleh. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pendapatannya. Pendapat tersebut didukung dalam penelitian Adnan, et,al (2022) menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap produktivitas tenaga kerja. Gita dan Woyanti (2021) menunjukkan bahwa secara parsial variabel IPM berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di kabupaten/kota di Provinsi Yogyakarta. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan pendapat Becker dalam kutipan (Hariani, 2019) yang menunjukkan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Ketimpangan IPM antar daerah mendorong ketimpangan pembangunan yang terjadi sehingga ketimpangan pendapatan antar daerah semakin melebar.

Berdasarkan dari kajian diatas disparitas pendapatan masih menjadi masalah yang harus segera di tuntaskan. Pemerintah sebagai garda terdepan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan harus melakukan pemerataan pembangunan atau pendapatan pada daerahdaerah yang membutuhkan pembangunan infratraktur untuk pertumbuhan ekonomi sesuai dengan kebutuhan daerah masingmasing. Tujuan dari pembangunan berkelanjutan untuk melanjutkan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan potensi sektor-sektor daerah tertentu agar daerah tersebut dapat berkembang dan menjadikan pusat pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan uraian latar belakang maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DISPARITAS PENDAPATAN REGIONAL DI PROVINSI ACEH.”

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Berapa besar pengaruh secara parsial Pertumbuhan Ekonomi terhadap Disparitas Pendapatan di Provinsi Aceh?
2. Berapa besar pengaruh secara parsial Indeks Pembangunan Manusia terhadap Disparitas Pendapatan Provinsi Aceh?
3. Berapa besar pengaruh secara parsial Dana Alokasi Khusus terhadap Disparitas Pendapatan Provinsi Aceh?
4. Berapa besar pengaruh secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Dana Alokasi Khusus terhadap Disparitas Pendapatan Provinsi Aceh?



### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial Pertumbuhan Ekonomi terhadap disparitas pendapatan di Provinsi Aceh
2. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial Indeks Pembangunan Manusia terhadap Disparitas Pendapatan Provinsi Aceh
3. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Disparitas Pendapatan Provinsi Aceh
4. Untuk menganalisis pengaruh secara simultan antara Pertumbuhan Ekonomi, Indeks pembangunan manusia dan Dana Alokasi Khusus terhadap tingkat Disparitas Pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari uraian tujuan yang telah dijelaskan diatas, maka manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk peneliti, sebagai penambah ilmu dan pemikiran yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian juga dapat menjadi salah satu referensi dalam proses pembelajaran menambah wawasan dan pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan disparitas pendapatan.
2. Untuk penelitian kedepannya, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam melakukan penelitian dengan tema yang sama.

3. Sebagai masukan kepada Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh, dalam penyusunan kebijakan dan strategi dalam mengatasi disparitas pendapatan regional atau antar wilayah.

## **1.5 Sitematika Penelitian**

Sistematikan penelitian bertujuan agar penelitian lebih teratur dan mepermudah pembaca. Berikut adalah sistematika penelitian yang digunakan pada penelitian ini:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan juga terdapat sistematika penelitian.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bagian ini berupa uraian mengenai landasan teori yang berkaitan dengan tema proposal.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan secara rinci metode penelitian yang digunakan oleh peneliti beserta dengan justifikasinya, jenis penelitian, lokasi, jenis data serta metode analisis penelitian yang digunakan.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini memuat tentang hasil penelitian, yang dimulai dengan menguraikan gambaran umum lokasi penelitian dan menguraikan hasil analisis statistik deskriptif dan inferensial.

## BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir yang memuat kesimpulan dari penelitian serta saran-saran ataupun rekomend



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Disparitas Pendapatan

##### 2.1.1 Definisi Disparitas Pendapatan

Disparitas pendapatan antardaerah merupakan aspek yang umum terjadi dalam proses pembangunan ekonomi pada suatu daerah, baik dari sisi pembangunan regional maupun nasional. Disparitas pendapatan disebabkan oleh perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing daerah dan perbedaan kandungan sumber daya alam pada suatu daerah. Sehingga terdapat daerah yang relatif maju dan daerah yang relatif terbelakang serta membawa implikasi terhadap kesejahteraan dalam bentuk ketidakpuasan masyarakat (Sjafrijal, 2012). Terjadinya perbedaan kesejahteraan menyebabkan perbedaan tingkat pembangunan di berbagai daerah yang menimbulkan *gap* atau perbedaan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.

##### 2.1.2 Teori Disparitas Pendapatan

Teori Neo Klasik menemukan sebuah prediksi hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi dengan disparitas pendapatan antar daerah. Teori disparitas pendapatan pertama kali muncul dari suatu hipotesis yaitu “U-terbalik” yang dikemukakan oleh Simon Kuznet tahun 1995. Kuznet (1995) menyatakan bahwa awal mula

ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan tidak merata. Proses ini akan terus terjadi hingga disparitas mencapai titik puncak.

### **2.1.3 Penyebab dan Kebijakan Disparitas**

Menurut (Sjafrijal, 2012), faktor-faktor yang menyebabkan disparitas pendapatan antardaerah adalah sebagai berikut:

#### **1. Perbedaan Kandungan Sumber Daya Alam**

Perbedaan kandungan sumber daya alam disebabkan oleh adanya daerah yang memiliki kandungan sumber daya alam tinggi dapat memproduksi barang dengan biaya relatif murah, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Sedangkan daerah yang memiliki kandungan sumber daya alam kecil akan memproduksi barang dengan biaya produksi lebih tinggi dan daya saingnya lemah. Hal ini dapat mempengaruhi terjadinya disparitas pendapatan antardaerah.

#### **2. Perbedaan Kondisi Demografis**

Perbedaan kondisi demografis yang cukup besar dapat mendorong terjadinya disparitas, karena kondisi demografis yang baik akan memiliki produktivitas kerja lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penyediaan lapangan kerja. Sebaliknya, apabila kondisi demografis kurang baik maka akan menyebabkan produktivitas kerja rendah dan pertumbuhan ekonomi menjadi rendah.

### 3. Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa

Kondisi ini disebabkan oleh kegiatan perdagangan antardaerah dan transmigrasi yang tidak lancar. Apabila migrasi tidak lancar, maka akan menyebabkan tenaga kerja yang berlebihan di suatu daerah dan tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang sangat membutuhkan. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila disparitas pendapatan antardaerah cenderung tinggi pada negara berkembang, di mana mobilitas barang dan jasa kurang lancar.

### 4. Konsentrasi Kegiatan Ekonomi

Kondisi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan kegiatan ekonomi yang besar dapat mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat. Konsentrasi kegiatan ekonomi tersebut disebabkan oleh sumber daya alam yang lebih banyak pada daerah tertentu, menurunnya fasilitas transportasi kegiatan ekonomi antardaerah, kondisi demografis di mana sumber daya manusia tersedia dengan kualitas yang lebih baik.

### 5. Alokasi Dana Pembangunan Antardaerah

Investasi merupakan salah satu faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, daerah dengan alokasi investasi lebih besar dari pemerintah akan cenderung memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih cepat. Kondisi ini akan mendorong proses pembangunan daerah melalui lapangan kerja yang lebih banyak. Demikian pula sebaliknya,

apabila investasi rendah maka tingkat pertumbuhan ekonomi daerah akan lambat.

Dilihat dari faktor-faktor yang menentukan disparitas antardaerah, maka perlu adanya kebijakan dan upaya untuk menanggulangnya yaitu kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah. Kebijakan dan upaya tersebut antara lain (Sjafrizal, 2012):

#### 1. Penyebaran Pembangunan Prasarana Perhubungan

Kebijakan dan upaya penyebaran pembangunan prasarana dan sarana secara merata yaitu dengan memperbaiki fasilitas jalan, terminal dan pelabuhan guna mendorong proses perdagangan antardaerah. Selain itu, jaringan dan fasilitas komunikasi juga sangat penting untuk dikembangkan agar tidak ada daerah yang terpencil. Dengan demikian daerah yang kurang maju dapat meningkatkan kegiatan perdagangan dan investasi, sehingga dapat meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan mendorong proses pembangunan.

#### 2. Mendorong Transmigrasi dan Migrasi Spontan

Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk ke daerah yang kurang berkembang dengan menggunakan fasilitas dan dukungan dari pemerintah. Sedangkan migrasi spontan merupakan perpindahan penduduk yang dilakukan secara sukarela dengan menggunakan biaya sendiri. Hal ini dapat mengatasi kurangnya tenaga kerja yang sedang dialami oleh daerah terbelakang, sehingga proses pembangunan berjalan dengan lancar dan dapat mengurangi disparitas pendapatan.

### 3. Pengembangan Pusat Pertumbuhan

Kebijakan dan upaya ini dapat mengurangi disparitas antardaerah karena pusat pertumbuhan menganut konsep konsentrasi dan desentralisasi. Konsep konsentrasi diperlukan agar penyebaran kegiatan pembangunan dapat dilakukan dengan mempertahankan tingkat efisiensi usaha. Sedangkan konsep desentralisasi adalah untuk penyebaran pembangunan antardaerah. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pembangunan pusat-pusat pertumbuhan dalam skala kecil dan menengah, sehingga dapat meningkatkan kegiatan pembangunan yang telah tersebar secara merata.

### 4. Pelaksanaan Otonomi Daerah

Terlaksanakannya konsep otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan, masyarakat dapat menggali potensi yang ada di daerah tersebut, sehingga proses pembangunan akan dapat lebih ditingkatkan dan secara bersamaan disparitas pendapatan antar daerah akan berkurang.

#### **2.1.4 Indikator Disparitas Pendapatan**

##### 1. *Size Distribution*

*Size distribution* merupakan indikator yang paling sering digunakan oleh para ekonom untuk menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga. Dalam *size distribution* disparitas secara umum dihitung dengan menghitung berapa persen pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk yang paling miskin, ukuran disparitas dapat dilakukan dengan



membandingkan persentase pendapatan yang diterima oleh 40 persen anggota kelompok bawah (lapisan penduduk paling miskin) dengan persentase yang diterima oleh 20 persen anggota kelompok atas (lapisan penduduk terkaya). Rasio inilah yang sering digunakan sebagai ukuran tingkat ketidakmerataan antara kelompok yang sangat miskin dan kelompok yang sangat kaya di suatu negara (Soebagyo, 2016).

## 2. Kurva Lorenz

*Conrad Lorenz* dalam pembahasan Kurva Lorenz menghubungkan penerimaan pendapatan dan relative yang dikumulatifkan sebagai sumbu vertikal, dengan pendapatan yang sudah dikelompokkan dalam *percentiles* sebagai sumbu horizontal.

## 3. Indeks Gini

Disparitas pendapatan dapat diukur menggunakan Indeks Gini. Koefisien Gini merupakan ukuran dari ketidakmerataan suatu pendapatan yang angkanya berkisar antara nol hingga satu.

$$G = \frac{\sum P_i(Q_i + Q_{i-1})}{200}$$

G = Indeks Gini

$P_i$  = persentase rumah tangga pada kelas pendapatan ke- $i$

$Q_i$  = Presentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke- $i$

$Q_{i-1}$  = Presentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke- $i-1$

$k$  = Banyaknya kelas pendapatan

Apabila nilai gini 0, maka pemerataan pendapatan atau distribusi pendapatan sempurna dan sebaliknya apabila nilai gini semakin mendekati satu atau nilainya satu maka ketidakmerataan pendapatan atau disparitas pendapatan menjadi tinggi.

## **2.2 Pertumbuhan Ekonomi**

### **2.2.1 Definisi Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut (Sukirno, 2012) pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan fisik produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti penambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi sektor jasa dan penambahan produksi sektor modal yang biasa digambarkan dengan tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil yang dicapai. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan output agregat atau pendapatan riil. Dimana, kedua peningkatan tersebut sering dihitung perkapita atau selama jangka waktu yang cukup panjang sebagai akibat peningkatan penggunaan input.

### **2.2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi**

Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan kapasitas dalam jangka panjang untuk menyediakan berbagai barang ekonomi bagi penduduknya (Todaro & Smith, 2011). Teori pertumbuhan ekonomi menurut Harrod-Domar menyatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi ditentukan secara bersama-sama oleh rasio tabungan nasional dan rasio modal-output

nasional. Peningkatan investasi diperlukan untuk meningkatkan pengeluaran agregat.

Korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan dapat digambarkan dengan kurva Kuznets berbentuk U terbalik. Pada tahap awal pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan karena distribusi pendapatan yang tidak merata, namun dalam jangka panjang pemerataan akan lebih tercapai sampai tingkat ketimpangan menurun. Kurva Kuznets dapat dihasilkan oleh proses pertumbuhan berkelanjutan yang berasal dari perluasan sektor modern, seiring dengan kemajuan suatu negara dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern (Todaro & Smith, 2011).

### **2.2.3 Faktor-faktor yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi sebagai alat ukur untuk melihat sejauh mana prestasi setiap daerah dalam memajukan kegiatan ekonomi di daerahnya sendiri. Oleh karena itu perlu diketahui faktor apa saja yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Sukirno (2012: 103-106) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu:

#### **1. Sumber Daya Alam**

Tersedianya kekayaan sumber daya alam yang potensial dapat menjamin berlangsungnya pertumbuhan secara lancar. Sumber daya alam yang tersedia harus dimanfaatkan dan diolah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat serta dapat mempermudah

usaha untuk mengembangkan perekonomian suatu negara. Apabila suatu negara mempunyai kekayaan sumber daya alam yang diusahakan dapat menguntungkan, maka akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

## 2. Akumulasi Modal

Akumulasi modal atau pembentukan modal merupakan peningkatan stok modal dalam jangka waktu tertentu. Proses pembentukan modal bersifat kumulatif, yaitu keberadaan tabungan nyata dan pertambahannya, memobilisasi tabungan dan menyalurkan ke bidang usaha yang dikehendaki dan mempergunakan tabungan untuk investasi. Akumulasi modal sebagai permintaan yang efektif dan di lain pihak menciptakan efisiensi produktif bagi produksi di masa depan.

## 3. Kemajuan Teknologi

Perubahan pada teknologi dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, modal dan faktor produksi lain. Schumper menganggap inovasi (pembaharuan) sebagai faktor teknologi yang paling penting dalam pertumbuhan ekonomi. Menurut Kuznets, Inovasi terdiri dari dua macam, yaitu penurunan biaya yang tidak menghasilkan perubahan apapun pada kualitas produk dan pembaharuan yang menciptakan permintaan baru akan produk tersebut.

## 4. Pembagian Kerja dan Skala Produksi

Adam Smith menekankan pentingnya pembagian tenaga kerja *division of labour* bagi perkembangan ekonomi, karena dapat

menciptakan perbaikan kemampuan produksi buruh. Pembagian kerja bergantung pada luas pasar, sementara luas pasar tergantung pada kemajuan teknologi, yaitu berapa besar perkembangan permintaan, tingkat produksi pada umumnya, sarana transportasi dan lainnya. Apabila skala produksi luas, spesialisasi dan pembagian kerja akan menjadi luas pula, produksi meningkat, maka laju pertumbuhan ekonomi akan meningkat.

#### **2.2.4 Indikator dan Tolak Ukur Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut (Kusumawati & Wiksuana, 2018) pertumbuhan ekonomi menunjukkan seberapa jauh aktivitas perekonomian dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat. Tolak ukur pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah yaitu menggunakan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yakni hasil jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu.

Perhitungan pertumbuhan ekonomi melalui indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terdapat dua metode yang dapat digunakan, antara lain:

1. Metode Langsung, dapat dipakai melalui tiga macam pendekatan yaitu:

- a) Pendekatan Produksi

PDRB adalah hasil jumlah nilai tambah bruto (NTB) atau nilai barang/jasa yang diperoleh dari bagian-bagian produksi di suatu daerah dalam waktu tertentu (biasanya satu tahun). Sedangkan NTB

merupakan Nilai Produksi Bruto dari barang/jasa yang dikurangi seluruh biaya antara yang telah digunakan dalam proses produksi.

b) Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan jumlah seluruh balas jasa yang diambil dari faktor-faktor produksi yang berperan dalam proses produksi di suatu daerah dalam waktu tertentu (biasanya satu tahun). Nilai Tambah Bruto merupakan total dari upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal serta keuntungan dan yang berkaitan dengan sebelum pemotongan pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.

c) Pendekatan Pengeluaran

PDRB merupakan total seluruh pengeluaran yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan persediaan ekspor neto di dalam suatu daerah dalam waktu tertentu (biasanya satu tahun). Nilai Tambah Bruto berpusat pada pemakaian akhir dari barang/jasa yang diproduksi.

2. Metode Tidak Langsung

a) Perhitungan Atas Dasar Harga Berlaku

PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) yaitu total seluruh Nilai Tambah Bruto (NTB) yang dihasilkan oleh bagianbagian dalam waktu tertentu (biasanya satu tahun). Nilai Tambah Bruto ADHB diperoleh dari hasil pengurangan NTB dengan biaya masing-masing dinilai atas dasar harga berlaku. Nilai Tambah Bruto menggambarkan perubahan volume produksi yang dihasilkan serta

tingkat perubahan harga dari masing-masing aktifitas, subsektor dan sektor.

b) Perhitungan Atas Dasar Harga Konstan

PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) penilaiannya digunakan dengan harga suatu tahun dasar tertentu. Nilai Tambah Bruto ADHK menggambarkan hanya perubahan volume produksi. Pengaruh perubahan harga diganti dengan cara menilai dengan harga suatu tahun dasar tertentu. Perhitungan ADHK digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara agregat atau sektoral serta untuk melihat perubahan struktur ekonomi suatu daerah setiap tahun.

## **2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

### **2.3.1 Definisi Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang mendasar yaitu usia hidup, pengetahuan, dan standar hidup layak. Aspek usia hidup indikatornya adalah angka harapan hidup, aspek pengetahuan indikatornya adalah harapan lama sekolah rata-rata lama sekolah, aspek standar hidup layak indikatornya adalah pengeluaran per kapita yang disesuaikan (BPS 2022).

### **2.3.2 Teori Indeks Pembangunan Manusia**

Menurut Becker (dalam Lee & Lee, 2018) *human capital* yang ditunjukkan dengan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Pendidikan memegang peranan

penting dalam menentukan tingkat pendapatan seseorang. Dalam teori *Human Capital* juga dijelaskan bahwa setiap tambahan satu tahun sekolah dapat meningkatkan produktivitas kerja dan tingkat pendapatan seseorang.

Menurut Todaro & Smith, (2011) mengemukakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan cara yang digunakan untuk mengukur pencapaian dalam suatu pembangunan manusia suatu daerah dengan mengombinasikan pencapaian di bidang pendidikan, kesehatan dan pendapatan riil per kapita. Suatu daerah harus menjunjung tinggi bidang pendidikan dan kesehatan, apabila bidang tersebut semakin membaik maka akan meningkatkan potensi yang dimiliki suatu daerah dan kualitas manusia semakin meningkat.

Pembangunan manusia pada dasarnya memiliki empat komponen utama, yaitu produktivitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), kesinambungan (*sustainability*) dan pemberdayaan (*empowerment*). Apabila peningkatan dari keempat komponen tersebut berjalan dengan maksimal, maka pembangunan manusia akan berhasil dengan baik yang dicirikan oleh peran manusia sebagai agen pembangunan yang efektif.

### **2.3.3 Komponen dan Indikator Indeks Pembangunan Manusia**

Menurut Todaro dalam Saapat (2020) pembangunan manusia ada tiga komponen universal sebagai tujuan utama meliputi: (1) Kecukupan, yaitu merupakan kebutuhan dasar manusia secara fisik. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi akan



menghentikan kehidupan seseorang, meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan keamanan. Jika satu saja tidak terpenuhi akan menyebabkan keterbelakangan absolut. (2) Jati Diri, yaitu merupakan komponen dari kehidupan yang serba lebih baik adalah adanya dorongan dari diri sendiri untuk maju, untuk menghargai diri sendiri, untuk merasa diri pantas dan layak mengejar sesuatu, dan seterusnya. Semuanya itu terangkum dalam self esteem (jati diri). (3) Kebebasan dari Sikap Menghamba, yaitu merupakan kemampuan untuk memiliki nilai universal yang tercantum dalam pembangunan manusia adalah kemerdekaan manusia.

## **2.4 Dana Alokasi Khusus**

### **2.4.1 Definisi Dana Alokasi Khusus**

Menurut Suhardi (2018) Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus, karena itu alokasi yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasional khusus. Definisi Dana Alokasi Khusus (DAK) Menurut Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2005 yaitu, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang

dialokasikan kepada daerah tertentu yang mempunyai kebutuhan khusus dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.

Pembiayaan kebutuhan khusus memerlukan dana pendamping dari penerimaan umum APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) sebagai komitmen dan tanggung jawab daerah dalam pembiayaan program-program yang merupakan kebutuhan khusus tersebut. DAK dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat seperti pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur masyarakat dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional”.

#### **2.4.2 Faktor-Faktor yang Mendukung Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Menurut Khusaini (2018) menjelaskan tiga faktor yang mempengaruhi Dana Alokasi Khusus (DAK), antara lain:

1. Daerah tertinggal masih sering dijumpai

Dimana daerah tersebut belum mampu dalam mendanai seluruh pengeluarannya. Sehingga, dengan adanya peran DAK mampu membiayai seluruh kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat.

## 2. Pemerataan Pembangunan yang tidak merata

Dimana dengan adanya penyaluran DAK dapat menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah masih tertinggal.

## 3. Pengangguran yang semakin banyak

Penyaluran DAK dapat dimanfaatkan untuk mendorong peningkatan produktifitas perluasan kerja dan diversifikasi ekonomi terkhusus di daerah pedesaan, melalui berbagai kegiatan khusus di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, serta infrastruktur sehingga akan mengurangi angka pengangguran.

### **2.4.3 Perhitungan Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Perhitungan dana alokasi umum dilakukan melalui dua tahapan, yaitu:

1. Penentuan daerah yang menerima DAK
2. Penentuan besaran alokasi DAK setiap daerah

Menurut Khusaini (2018) menjelaskan penentuan daerah tertentu harus dapat memenuhi kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis, penentuan masing-masing kriteria sebagai berikut:

- a. Kriteria umum, diasumsikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.

- b. Kriteria khusus, diasumsikan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otsus dan karakteristik daerah.
- c. Kriteria teknis, disusun sesuai indikator-indikator yang dapat memberikan gambaran kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.

## 2.5 Penelitian Terkait

**Tabel 2.1**  
**Penelitian terkait**

No	Nama peneliti, tahun dan judul	Metode Analisis	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Gita & Woyanti (2021) The Effect of Economic Growth, HDI, District/City Minimum Wage and Unemployment on Inequity of Income Distribution in Province of D.I Yogyakarta (2010-2018)	Analisis Regresi data panel	Variabel dependen: Ketimpangan Pendapatan  Variabel Independen: Pertumbuhan Ekonomi dan IPM	Variabel independen: upah dan Pengangguran	IPM yang mencerminkan kualitas sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Sedangkan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

2	Ananda & Prabowo (2021) Analisis Tipologi Wilayah dan Disparitas Pendapatan di Provinsi Jawa Timur	Analisis korelasi Pearson	Variabel Independen: Disparitas Pendapatan  Variabel dependen: Pertumbuhan ekonomi		pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap disparitas pendapatan, artinya setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan disparitas pendapatan
3	(Prawoto & Cahyani, 2020) Analysis of unequal distribution of population income in Indonesia	Analisis regresi data panel.	Variabel dependen: Ketimpangan Pendapatan  Variabel independen: Indeks Pembangunan manusia	Variabel independen: Pengangguran dan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)	pengujian parsial variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa, Indonesia,
4	(Pradana & Sumarsono, 2018) Human Development Index, Capital Expenditure, Fiscal Desentralization to Economic Growth and Income Inequality in	menggunakan Analisis regresi data panel.	Variabel dependen: Ketimpangan Pendapatan  Variabel independen: Indeks	Variabel Independen: Pengeluaran Modal dan Desentralisasi Fiskal	Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

	East Java Indonesia		Pembangu na n Manusia		
5	Azizi (2018) Dampak Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap KetimpanganP roduk Domestik Regional Bruto di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2005 – 2014	Analisi s Regresi linear bergan da	Variabel independe n: Ketimpan gan  Variabel dependen; Dana Alokasi Khusus	Variabel dependen: DAU dan DBH	Dana Alokasi Khusus berpengaruh Negatif dan signifikan di mana ketika nilai Dana Alokasi Khusus naik maka tingkat Ketimpangan Produk Domestik Regional Bruto Di Provinsi Sulawesi
6	Arif & Agustin Wicaksani, n.d. (2017) Ketimpangan Pendapatan Propinsi Jawa Timur dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi nya	Mengu na kan pendekt an kuantit atif dengan mengg una kan analisis regresi data panel	Variabel dependen: Ketimpan gan Pendapata n  Variabel Independ en: Pertumbu han Ekonomi & Indeks Pembangu nan manusia	Variabel Independ en: Tenaga Kerja & Jumlah Pendudu k	Variabel Indeks PembangunanM anusia berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan dan variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap tingkat Ketimpangan.

## **2.6 Pengaruh Antar Variabel**

### **2.6.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Disparitas Pendapatan**

Penelitian Ananda & Prabowo (2021) mendapat hasil pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap disparitas pendapatan, artinya setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan disparitas pendapatan begitu pula sebaliknya, penurunan pertumbuhan ekonomi akan menaikkan disparitas pendapatan. Keadaan tersebut sejalan dengan data pada penelitian yang digunakan dimana pada pertumbuhan ekonomi memiliki trend penurunan setiap tahunnya dan pada disparitas pendapatan (IW) memiliki trend kenaikan setiap tahunnya korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan ,pada tahap awal pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan karena distribusi pendapatan yang tidak merata, namun dalam jangka panjang pemerataan akan lebih tercapai sampai tingkat ketimpangan menurun. Kurva Kuznets dapat dihasilkan oleh proses pertumbuhan berkelanjutan yang berasal dari perluasan sektor modern, seiring dengan kemajuan suatu negara dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern (Todaro & Smith, 2011)

## **2.6.2 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Disparitas Pendapatan**

Gita & Woyanti (2021) IPM yang mencerminkan kualitas sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini karena IPM yang tinggi akan meningkatkan produktivitas seseorang sehingga pendapatan yang diperoleh akan meningkat dan mendorong penurunan ketimpangan distribusi pendapatan. Sehingga semakin tinggi IPM maka semakin tinggi pula tingkat produktivitas penduduk yang kemudian akan menyebabkan tingkat pendapatan semakin tinggi dan akan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi.

## **2.6.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Disparitas Pendapatan**

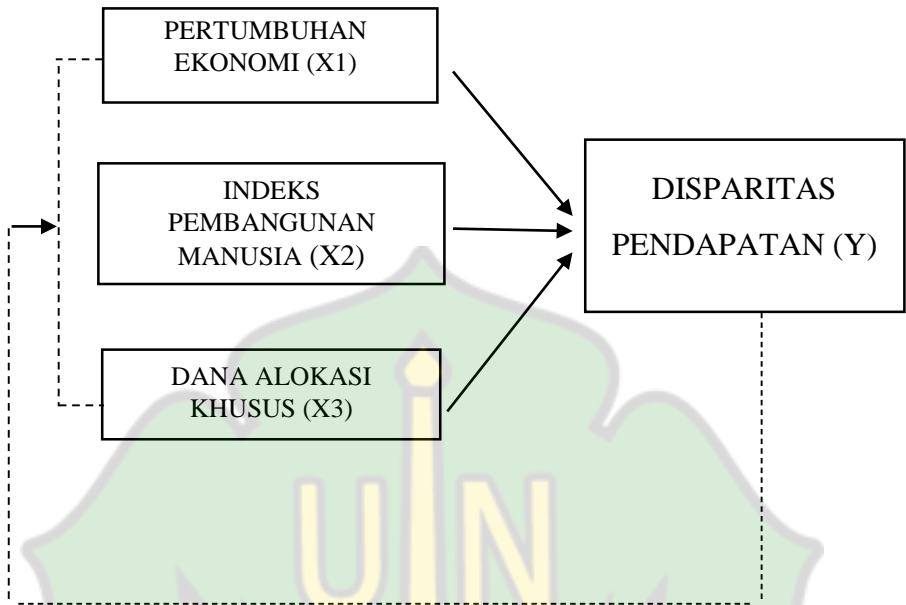
Penelitian Azizi (2018) Dana Alokasi Khusus berpengaruh Negatif dan signifikan di mana ketika nilai Dana Alokasi Khusus naik maka tingkat Ketimpangan Produk Domestik Regional Bruto Di Provinsi Sulawesi Selatan akan mengalami penurunan atau sebaliknya ketika Dana Alokasi Khusus mengalami penurunan maka tingkat ketimpangan Produk Domestik Regional Bruto Di Provinsi Sulawesi Selatan akan mengalami peningkatan. Hasil ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan DAK. Pendapatan daerah yang berupa Dana Perimbangan (transfer daerah)



dari pusat menuntut daerah membangun dan mensejahterahkan rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan daerah yang proporsional dan profesional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (Dana Alokasi Khusus) untuk Dengan demikian, menurut pendapat ini, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah daerah dianggap lebih efisien dalam mengalokasikan dana ke masing-masing sektor, jika dibandingkan dengan pemerintah pusat.

## **2.7 Kerangka Berpikir**

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya variabel Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Disparitas Pendapatan seperti gambar berikut:



## 2.8 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang timbul dari permasalahan yang diteliti. Berdasarkan latar belakang penelitian, teori penelitian dan kerangka berpikir yang telah dibahas sebelumnya. Penelitian ini memuat hipotesis sebagai berikut :

- H1: Terdapat pengaruh signifikan PE secara parsial terhadap Disparitas Pendapatan di Provinsi Aceh
- H2: Terdapat pengaruh signifikan IPM secara parsial terhadap Disparitas Pendapatan di Provinsi Aceh
- H3: Terdapat pengaruh signifikan DAK secara parsial terhadap Disparitas Pendapatan di Provinsi Aceh.

H4: Terdapat pengaruh signifikan PE, IPM dan DAK secara bersama-sama terhadap Disparitas Pendapatan di Provinsi Aceh.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini tergolong dalam penelitian eksplanasi. Menurut (Sugiyono, 2017) penelitian eksplanasi adalah penelitian yang menjelaskan kedudukan antara variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara variabel yang satu dengan yang lain melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung melainkan melalui media perantara berupa lembaga atau instansi tertentu yang memiliki wewenang dalam memberikan informasi atau mempublikasikannya. Data sekunder yang digunakan berbentuk data panel. Sumber data dan variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah. Disparitas Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia data tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan data Dana Alokasi Khusus data tersebut bersumber dari dari BPS.

### **3.3 Sampel Penelitian**

Sampel penelitian ini adalah data disparitas pendapatan, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia dan dana alokasi khusus pada 23 kabupaten di Provinsi Aceh yang dibatasi selama periode 2011-2022 (12 tahun).

### **3.4 Variabel Penelitian**

#### **3.4.1 Klasifikasi Variabel**

Penelitian ini menggunakan variabel yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu variabel terikat (*dependen*) dan variabel bebas (*independen*). Dalam penelitian ini variabel terikat (*dependen*) adalah disparitas pendapatan (Y). Sedangkan variabel bebas (*independen*) dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi (PE), Indeks Pembangunan manusia (IPM) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

#### **3.4.2 Definisi Operasional Variabel**

Berdasarkan klasifikasi variabel diatas, maka selanjutnya diuraikan definisi operasional variabel sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

No	Variabel	Indikator	Satuan Data	Sumber Data	Item
1.	Disparitas Pendapatan	Indeks Gini	Indeks $G = \frac{\sum P_i(Q_i + Q_i - 1)}{100}$	BPS	1
2.	Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat PDRB atas harga konstan	Persen (%)	BPS	1
3.	Indeks Pembangunan Manusia	Tingkat pendidikan dan kesehatan	Indeks	BPS	2
4.	Dana Alokasi Khusus	Realisasi anggaran dana alokasi	Milyar	BPS	1

### 3.5 Teknik Analisis Data

#### 3.5.1 Model dan Analisis Regresi Data Panel

##### 1. Model regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan model regresi data panel yaitu penggabungan antara regresi data *time series* dan *cross section*.

Berikut adalah bentuk model estimasi data panel, yaitu:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} \dots + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

Y = Variabel Terikat (*Dependen*)

$X_{1it, 2it, 3it \dots nit}$  = Variabel Bebas (*Independen*)  
kabupaten/kota i tahun t

$\beta_0$  = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3,$  = Koefisien regresi pada masing-masing variabel bebas (*independen*)

$\varepsilon$  = *error term*

Model regresi data panel pada penelitian ini digunakan untuk menguji ketiga variabel bebas (*independen*) yaitu, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Dana Alokasi Khusus, maka model regresi data panel adalah sebagai berikut;

$$DP_{it} = \beta_0 + \text{LN}\beta_1 PE_{it} + \text{LN}\beta_2 IPM_{it} + \text{LN}\beta_3 DAK_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

$DP_{it}$  = Disparitas Pendapatan (Variabel *Dependen*)

$PE_{it}$  = Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten/kota i tahun t

$IPM_{it}$  = Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten i tahun

$DAK_{it}$  = Dana Alokasi Khusus provinsi i tahun t

i = *Cross Section* (kabupaten/kota)

t = *Time Series* (tahun)

$\beta_0$  = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien pada masing-masing variabel bebas  
(*independen*)

$\varepsilon$  = *error term*

### 3.5.2 Model Estimasi Regresi Data Panel

Menurut (Basuki & at,al 2017), ada tiga metode atau pendekatan yang dilakukan untuk mengestimasi model regresi data panel, yaitu Metode Common Effect, Metode Fixed Effect, dan Metode Random Effect. Dalam menentukan teknik atau model yang paling tepat untuk mengestimasi regresi data panel.



### 1. Pooled Least Square (PLS)/Common Effect Model (CEM)

*Common Effect Model (CEM)* adalah teknik pendekatan data panel yang paling sederhana, karena model ini menggabungkan data time series dan cross section menjadi data panel. Selanjutnya, pendekatan ini mengestimasi data panel dengan metode *Ordinary Least Square (OLS)*. *Common Effect Model (CEM)* dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$DP_{it} = \beta_0 + \beta_1 LNPE_{it} + \beta_2 LNIPM_{it} + \beta_3 LNDAK_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

$DP_{it}$  = Disparitas Pendapatan (Variabel *Dependen*)

$PE_{it}$  = Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten/kota  $i$  tahun  $t$

$IPM_{it}$  = Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten  $i$  tahun  $t$

$DAK_{it}$  = Dana Alokasi Khusus provinsi  $i$  tahun  $t$

$i$  = *Cross Section* (kabupaten/kota)

$t$  = *Time Series* (tahun)

$\beta_0$  = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien pada masing-masing variabel bebas

(*independen*)

$\varepsilon$  = *error term*

## 2. Fixed Effect Model

*Fixed Effect Model* (FEM) adalah model yang mengasumsikan bahwa besaran konstanta dipengaruhi oleh perbedaan obyek (*cross section*) dan juga perbedaan waktu (*time series*). Pendekatan ini juga menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS) dalam melakukan estimasi *Fixed Effect Model*.

Persamaan *Fixed Effect Model* (FEM) adalah sebagai berikut:

$$DP_{it} = \beta_0 + \beta_1 LNPE_{it} + \beta_2 LNIPM_{it} + \beta_3 LNDAK_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

$DP_{it}$  = Disparitas Pendapatan (Variabel *Dependen*)

$PE_{it}$  = Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten/kota i tahun t

$IPM_{it}$  = Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten i tahun

$DAK_{it}$  = Dana Alokasi Khusus provinsi i tahun t

i = *Cross Section* (kabupaten/kota)

t = *Time Series* (tahun)

$\beta_0$  = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien pada masing-masing variabel bebas

(*independen*)

$\varepsilon$  = *error term*

### 3. *Random Effect Model*(REM)

*Random Effect Model* (REM) adalah model regresi yang mengestimasi data panel dengan memperhitungkan error/residual. Model ini berasumsi adanya perbedaan konstanta dan perbedaan koefisien regresi yang disebabkan oleh error/residual yang memiliki hubungan antar obyek dan waktu. Metode yang dipakai dalam model ini adalah *Generalized Least Square* (GLS). Persamaan matematis *Random Effect Model* (REM) dapat ditulis sebagai berikut:

$$DP_{it} = \beta_0 + \beta_1 LNPE_{it} + \beta_2 LNIPM_{it} + \beta_3 LNDAK_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan :

$DP_{it}$  = Disparitas pendapatan antar kabupaten/kota  
(Variabel Dependen)

$PE_{it}$  = Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten/kota i  
tahun t

$IPM_{it}$  = Indeks Pembangunan Manusia di  
kabupaten/kota i tahun t

$DAK_{it}$  = Dana Alokasi Khusus di kabupaten/kota i  
tahun t

i = *Cross Section* (kabupaten)

t = *Time Series* (tahun)

$\beta_0$  = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	=Koefisien pada masing-masing variabel bebas (independen)
$\varepsilon$	= <i>error term</i>

### 3.5.3 Pemilihan Model Regresi Data Panel (Uji Spesifikasi Model)

Beberapa tahap pengujian dilakukan untuk menentukan model terbaik regresi data panel antara CEM, FEM dan REM. Pengujian tersebut terdiri dari tiga tahapan yaitu Uji Lagrange Multiplier (Uji LM), Uji Chow, dan Uji Hausman (Basuki et al., 2016). Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing uji spesifikasi model:

#### 1. Uji Lagrange Multiplier (Uji LM)

Uji LM dilakukan untuk memilih model terbaik antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Random Effect Model* (REM). Adapun hipotesis dalam pengujian ini yaitu:

$H_0$  : *Common Effect Model*

$H_1$  : *Random Effect Model*

Jika nilai probabilitas Bruesch-Pagan lebih besar dari  $\alpha = 0,10$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, sehingga model yang paling tepat untuk digunakan adalah *Common Effect Model* (CEM).

Sebaliknya, jika nilai probabilitasnya lebih kecil dari  $\alpha = 0,10$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, sehingga model yang paling tepat digunakan adalah *Random Effect Model*.

## 2. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk membantu memilih model terbaik antara *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model*.

Adapun hipotesis dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

$H_0$  : *Common Effect Model*

$H_1$  : *Fixed Effect Model*

Jika nilai probabilitas *Redudant Fixed Effect* lebih besar dari  $\alpha = 0,10$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, sehingga model yang paling tepat digunakan adalah *Common Effect Model* (CEM). Sebaliknya jika nilai probabilitas lebih kecil dari  $\alpha = 0,10$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, sehingga model yang paling baik digunakan adalah model *Fixed Effect Model* (FEM). Namun untuk lebih meyakinkan apakah *Fixed Effect Model* (FEM) merupakan model terbaik, maka diperlukan yang namanya Uji Hausman.

### 3. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk menentukan model terbaik antara *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM). Adapun hipotesis dalam pengujian ini sebagai berikut:

$H_0$  : *Random Effect Model* (REM)

$H_1$  : *Fixed Effect Model* (FEM)

Jika nilai dari probabilitas *Correclated Random Effect* lebih kecil dari  $\alpha = 0,10$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, sehingga model yang paling baik digunakan adalah model *Fix Effect Model* (FEM). Sebaliknya jika nilai probabilitas lebih besar dari  $\alpha = 0,10$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, sehingga model yang paling baik digunakan adalah *Random Effect Model* (REM).

### 3.6 Pengujian Hipotesis Penelitian

Pengujian hipotesis merupakan pengujian yang dihunakan untuk melihat apakah terdapat hubungan antara variabel terikat (*dependen*) dan variabel bebas (*independen*), terdapat tiga pengujian hipotesis yang umum dilakukan, yaitu Uji Hipotesis Parsial (Uji t), Uji Hipotesis Simultan (Uji F) dan Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).

#### 3.6.1 Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Uji secara parsial atau uji statistik t dilakukan untuk menguji seberapa besar pengaruh setiap variabel bebas (*independen*) mempengaruhi variabel terikat (*dependen*) secara parsial (satuan) dengan menganggap variabel lain tetap (*constant*). Uji t juga dapat

digunakan untuk melihat seberapa besar signifikan variabel bebas (*independen*) mempengaruhi variabel terikat (*dependen*). Bila hasil regresi menunjukkan nilai probabilitas lebih kecil dari  $\alpha = 0,10$ , maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas (*independen*) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (*dependen*). Sebaliknya jika nilai probabilitas lebih besar dari  $\alpha = 0,10$ , maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas (*independen*) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (*dependen*).

### **3.6.2 Uji Hipotesis Simultan (Uji F)**

Uji secara simultan atau uji F dilakukan untuk menguji seberapa besar pengaruh seluruh variabel bebas (*independen*) terhadap variabel terikat (*dependen*) secara simultan (bersamasama). Uji F dapat dilakukan dengan melihat nilai probabilitas Fstatistik lebih kecil dari  $\alpha = 0,10$ , maka dapat dikatakan bahwa seluruh variabel bebas (*independen*) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat (*dependen*). Sebaliknya jika nilai probabilitas F-statistik lebih besar dari  $\alpha = 0,10$ , dapat dikatakan bahwa seluruh variabel bebas (*independen*) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat (*dependen*).

### **3.6.3 Koefisien Determinasi $R^2$ (R-squared)**

Koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa jauh variabel bebas (*independen*) dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel terikat (*dependen*). Jika nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) mendekati 1, maka variabel terikat (*dependen*) secara keseluruhan dapat dijelaskan oleh variabel bebas

(*independen*). Sebaliknya jika nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) mendekati 0, maka variabel terikat (*dependen*) tidak dapat dijelaskan (hanya sedikit dapat dijelaskan) oleh variabel bebas (*dependen*).





## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Penelitian**

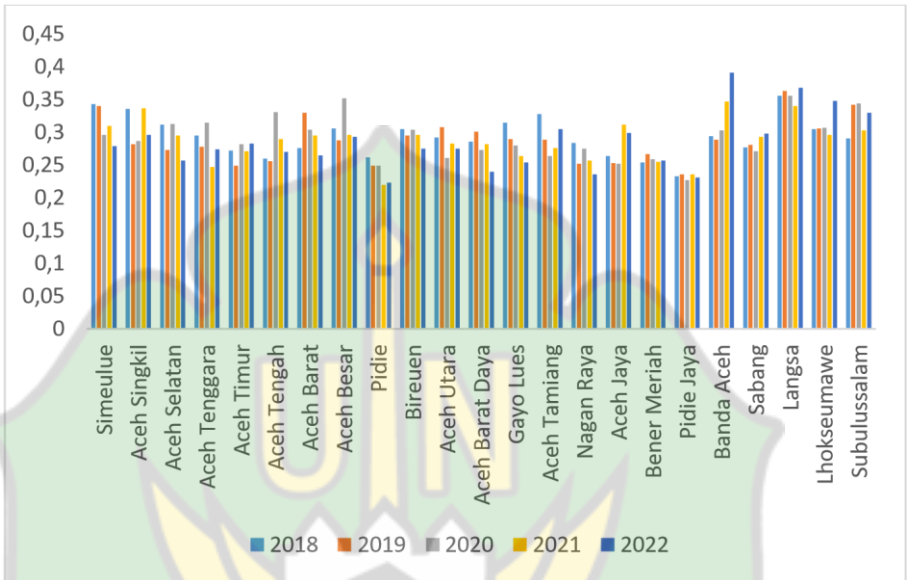
Penelitian ini menggunakan empat variabel, yaitu Disparitas Pendapatan yang diukur dengan Indeks Gini, Pertumbuhan Ekonomi yang diukur menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Dana Alokasi Khusus (DAK) selama 10 tahun terakhir, dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020.

##### **4.1.1 Disparitas Pendapatan**

Disparitas Pendapatan adalah aspek yang umum terjadi pada suatu negara dalam konteks distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi, kelompok masyarakat berpendapatan sedang dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta masalah pembangunan ekonomi antardaerah yang tidak merata. Berikut data indeks gini di Provinsi Aceh selama 5 tahun terakhir.

**Grafik 4.1**

**Indeks Gini Kabupaten/Kota Provinsi Aceh**



Sumber: BPS (2022)

Berdasarkan grafik 4.1 menjelaskan bahwa dari tahun 2018 hingga 2022 rata-rata nilai indeks gini di setiap kabupaten/kota di provinsi memiliki tren fluktuasi, namun yang tertinggi terjadi pada kota Banda Aceh sebesar 0,386 yang hampir menyentuh angka 0,4 yang berarti tingkat disparitas yang terjadi di kota Banda Aceh tergolong sedang, sedangkan nilai indeks gini yang terendah terjadi di kabupaten pidie pada tahun 2021 sebesar 0,220 hal ini disebabkan karena adanya pendapatan pada tiap-tiap daerah yang sangat berbeda, ada daerah yang potensial dengan pengelolaan asset daerah

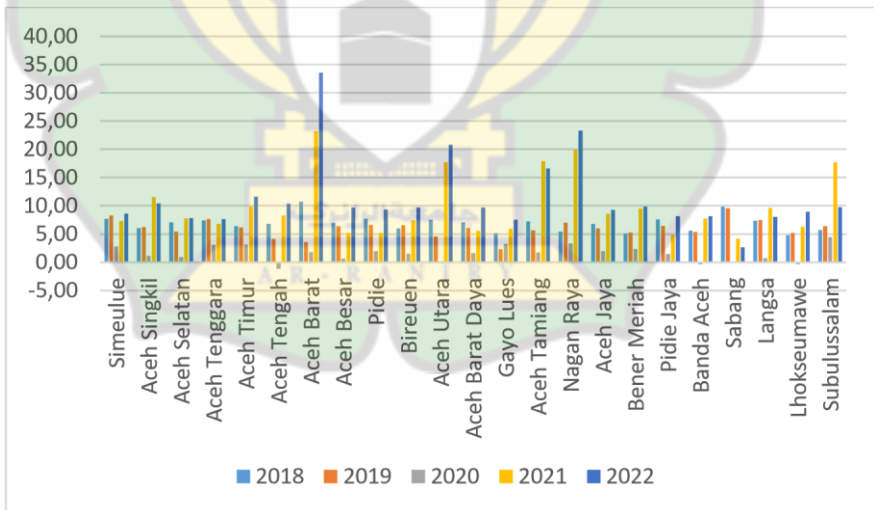
yang sangat optimal sehingga menyumbang pendapatan yang tinggi, sedangkan daerah lain dalam pengelolaan potensi daerah belum optimal sehingga pendapatan daerah masih sedikit diterima.

#### 4.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menjadi bagian yang penting dalam mengukur tingkat kemajuan suatu daerah, dimana pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan output secara agregat selama jangka waktu yang cukup panjang sebagai akibat kenaikan menggunakan input.

**Grafik 4.2**

**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Aceh**



Sumber: BPS (2022)

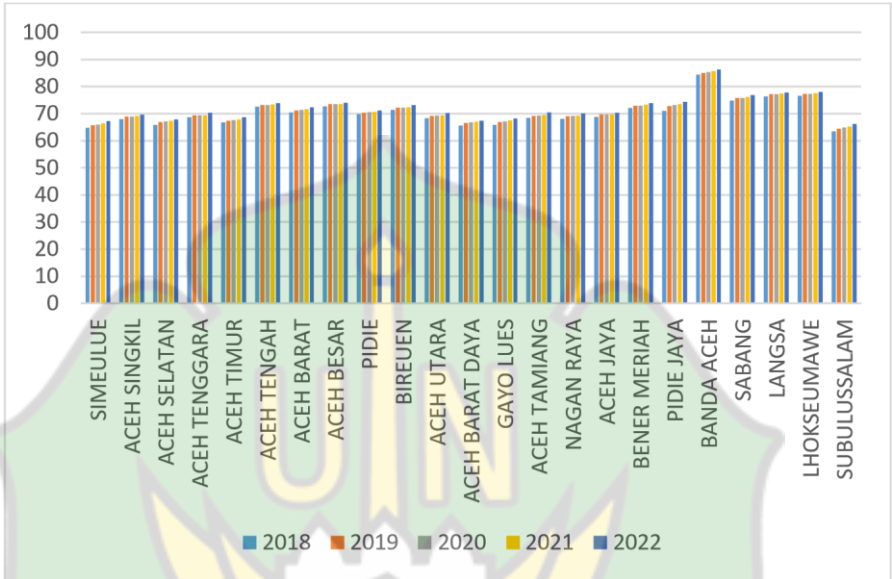
Berdasarkan grafik 4.2 laju pertumbuhan ekonomi dari 2018 hingga 2022 di Provinsi Aceh mengalami naik turun, terutama yang mengalami peningkatan yang sangat drastis terjadi pada kabupaten/kota Aceh Barat, Aceh Utara, dan Nagan Raya. Hal tersebut karena ada beberapa sektor pertumbuhan ekonomi yang strategis yang dikembangkan Aceh Barat, Aceh Utara, dan Nagan Raya sehingga memajukan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Pada tahun 2020 rata-rata kabupaten/kota mengalami pertumbuhan ekonomi yang menurun drastis, hal ini disebabkan karena pandemi covid-19 yang melanda di wilayah Indonesia termasuk wilayah provinsi Aceh.

#### **4.1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

IPM merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia dan berguna untuk menentukan tingkat pembangunan suatu wilayah/negara, IPM adalah indeks yang paling akurat digunakan untuk menganalisis disparitas pendapatan daerah sebagai variabel untuk mempertimbangkan pembangunan sosial dan ekonomi sebagai alat ukur keberhasilan sumber daya manusia di suatu negara maupun daerah.

**Grafik 4.3**

**Perkembangan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh**



*Sumber: BPS (2022)*

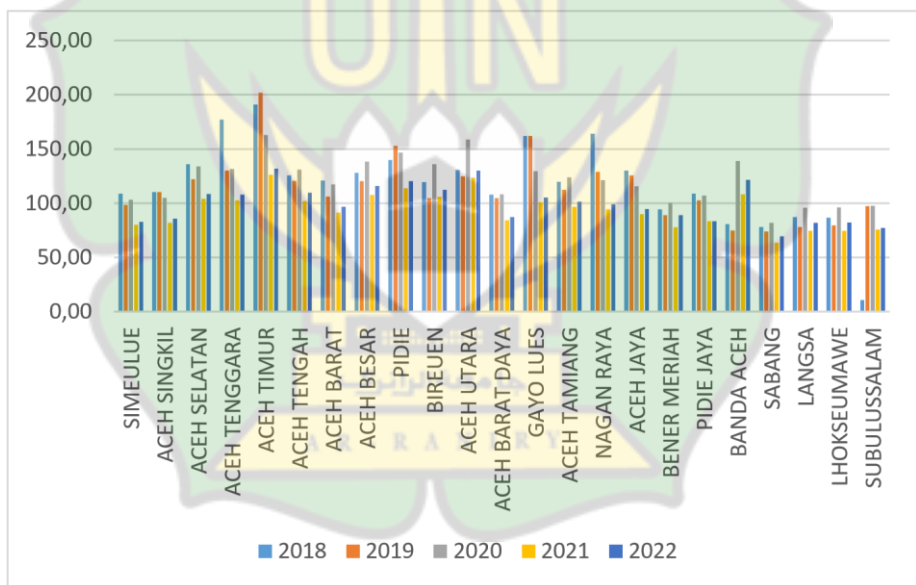
Pada grafik 4.3 menunjukkan bahwa perkembangan indeks pembangunan manusia terjadi peningkatan pada setiap tahunnya yang terendah terjadi pada kabupaten subulussalam yang mencapai angka teringginya yaitu sebesar 60,20 dan yang tertinggi terjadi di kota Banda Aceh yang mencapai angka 86,28. Dengan meningkatnya dan konsistensi tingkat IPM dari tahun ke tahun adanya kontribusi pemerintah Aceh untuk menjaga kualitas sumber daya manusia.

#### 4.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus merupakan bagian dari dana perimbangan yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai segala aktivitas khusus yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut adalah data Dana Alokasi Khusus (DAK) di Provinsi Aceh selama 10 tahun terakhir.

**Grafik 4.4**

#### **Perkembangan Dana Alokasi Khusus Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh**



*Sumber: BPS (2022)*

Pada Grafik 4.3 perkembangan alokasi dana di kabupaten/kota mengalami tren naik turun pada setiap tahunnya. Alokasi dana terendah terjadi pada kota Subulussalam di tahun 2018 sebesar 10,69 milyar, dan pengalokasian dana yang tertinggi terjadi pada kabupaten Aceh Timur di tahun 2019 sebesar 201,83 milyar angka tersebut naik signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya pengalokasian dana mencapai 190 milyar namun pada tahun 2020 sampai 2022 terus menurun.

## **4.2 Hasil Analisis Regresi Data Panel**

Penelitian ini menggunakan model regresi data panel untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Dana Alokasi Khusus Terhadap Disparitas Pendapatan regional di Provinsi Aceh. Ada tiga macam pendekatan estimasi data panel yang akan digunakan, yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM). Dimana untuk menentukan model terbaik yang akan digunakan dengan melakukan uji chow (Chow Test), uji hausman (Hausman Test), dan uji LM (Lagrange Multiplier Test).

### **4.2.1 Hasil Uji Chow**

Uji ini dilakukan untuk mengetahui dan memilih model yang terbaik antara Common Effect Model dan Fixed Effect Model, maka digunakan uji F Restricted dengan membandingkan nilai cross

section F. Dalam pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

H0 : *Common Effect Model*, diterima apabila cross-section  $F > 0,10$

H1 : *Fixed Effect Model*, diterima apabila cross-section  $F < 0,10$

Hasil Chow Test dapat dilihat di tabel berikut

**Tabel 4.1**

**Uji Chow**

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	10.073697	(22,219)	0.0000
Cross-section Chi-square	171.282966	22	0.0000

*Sumber: Data di olah*

Dari hasil uji chow pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa nilai P value sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,10, artinya bahwa model *Fixed Effect Model* (FEM) lebih baik dibandingkan dengan *Common Effect Model* (CEM)

#### **4.2.2 Hasil Uji Hausman**

Uji ini dilakukan untuk mengetahui dan memilih model yang terbaik antara Random Effect Model dan Fixed Effect Model. Maka



digunakan uji dengan nilai cross-section random. Pengujian dilakukan dengan hipotesis:  $H_0$  : *Random Effect Model*

$H_1$  : *Fixed Effect Model*

Jika nilai probabilitas cross-section random  $> 0,10$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Jika nilai probabilitas cross-section random  $< 0,10$  maka  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak.

Hasil Uji Hausman dapat dilihat di tabel berikut.

**Tabel 4.2**  
**Uji Hausman**

Test Summary	Chi -Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	6.331491	3	0.0966

*Sumber: data diolah*

Dari hasil uji hausman pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai P value sebesar 0,0966 lebih kecil dari 0,10, artinya bahwa model *Fixed Effect Model* (FEM) lebih baik dibandingkan dengan *Random Effect Model* (REM).

### 4.3 Hasil Regresi Data Panel *Fixed Effect Model* (FEM)

Pada estimasi regresi data panel, setelah pengujian uji *Chow*, uji Hausman, dan uji LM model yang terbaik yang diperoleh yaitu *Random Effect Model*. Hasil pengolahan data menggunakan REM pada penelitian ini terdapat pada tabel berikut:

**Tabel 4.3**  
**Hasil Regresi data panel *Fixed Effect Model* (FEM)**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C		0.276795		
	-0.807500		-2.917320	0.0039
LNPE	-4.40E-06	4.47E-06	-0.986080	0.3252
LNIPM	0.000248	6.33E-05	3.913602	0.0001
LNDK	1.12E-05	7.14E-06	1.570150	0.1178
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
	0.537065			
R-squared		Mean dependent var		0.284233
Adjusted R-squared	0.484218	S.D. dependent var		0.038525
S.E. of regression	0.027668	Akaike info criterion		-4.237024
Sum squared resid	0.167648	Schwarz criterion		-3.865461
Log likelihood	545.0354	Hannan-Quinn criter.		-4.087396
F-statistic	10.16273	Durbin-Watson stat		1.573528
Prob(F-statistic)	0.000000			

*Sumber: data di olah*

Model regresi data panel *Random Effect Model* (REM) dapat dijelaskan melalui persamaan berikut:

$$DP = -0,807 - 4,40 LNPE + 0,002 LNIPM + 1,12 LNDK$$

Keterangan:

DP = Disparitas Pendapatan

PE = Pertumbuhan Ekonomi

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

DAK = Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan hasil estimasi data panel dengan model penelitian *Random Effect Model* yang ditunjukkan pada tabel 4.4 dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, apabila selama periode 2011 s/d 2022 pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia dan dana alokasi khusus diasumsikan tetap, maka disparitas pendapatan regional di Provinsi Aceh akan menurun sebesar 0,807%.

*Kedua*, nilai koefisien dari variabel Pertumbuhan ekonomi sebesar -4,40 artinya setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1%, maka akan menurunkan disparitas pendapatan di provinsi aceh sebesar 4,40% dengan asumsi variabel lain konstan. Pertumbuhan

ekonomi berpengaruh negatif terhadap disparitas pendapatan regional di Provinsi Aceh Periode 2011 s/d 2022.

*Ketiga*, nilai koefisien dari variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,002 yang menunjukkan bahwa setiap terjadinya peningkatan indeks pembangunan manusia sebesar 1% maka akan meningkatkan tingkat disparitas pendapatan regional di Provinsi Aceh sebesar 0,002% dengan asumsi variabel lain di anggap konstan. Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh positif terhadap tingkat disparitas pendapatan regional di Provinsi Aceh periode 2011 s/d 2022.

*Keempat*, nilai koefisien dari variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 1,12 artinya apabila ada kenaikan dana alokasi khusus sebesar 1 miliar rupiah, maka akan meningkatkan disparitas pendapatan Regional di Provinsi Aceh sebesar 1,12% dengan asumsi variabel lain tetap. Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh positif terhadap Disparitas Pendapatan Regional di Provinsi Aceh periode 2011 s/d 2022.

#### **4.4 Uji Signifikansi (Uji T)**

Pada tabel 4.4 dapat diketahui bahwa nilai koefisien variabel pertumbuhan ekonomi (X1) sebesar 4,40 dan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,3252 lebih besar dari  $\alpha = 0,10$ , artinya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara variabel pertumbuhan ekonomi dengan disparitas pendapatan

regional di Provinsi Aceh periode 2011 s/d 2022. Nilai koefisien bernilai positif, artinya pengaruh yang ditimbulkan adalah pengaruh positif.

Variabel Indeks Pembangunan Manusia (X2) memiliki nilai koefisien sebesar 0,002 dan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0001 lebih kecil dari  $\alpha = 0,10$  , menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Indeks Pembangunan manusia dengan disparitas pendapatan regional di Provinsi Aceh periode 2011 s/d 2022. Nilai koefisien bernilai positif, artinya pengaruh yang ditimbulkan adalah pengaruh positif.

Variabel Dana Alokasi Khusus (X3) memiliki nilai koefisien sebesar 1,12 dan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,1178 lebih besar dari  $\alpha = 0,10$  , menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara variabel dana alokasi khusus dengan disparitas pendapatan regional di Provinsi Aceh periode 2011 s/d 2022. Nilai koefisien bernilai positif, artinya pengaruh yang ditimbulkan adalah pengaruh positif antara variabel dana alokasi khusus dengan disparitas pendapatan.

#### **4.5 Uji Simultan (Uji F)**

Uji Simultan biasanya digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh seluruh variabel bebas, yaitu pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia dan dana alokasi khusus terhadap variabel terikat yaitu disparitas pendapatan. Uji F dilakukan dengan melihat nilai probabilitas F-statistik dari  $\alpha = 0,10$ , dimana jika nilai

probabilitas F statistik lebih kecil dari dari  $\alpha = 0,10$  maka dapat dikatakan seluruh variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap disparitas pendapatan. Sebaliknya, jika nilai probabilitas Fstatistik lebih besar dari dari  $\alpha = 0,10$  maka dapat dikatakan seluruh variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap disparitas pendapatan. Hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H1 : Terdapat pengaruh Pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Dana Alokasi Khusus secara simultan terhadap Disparitas Pendapatan Regional di Provinsi Aceh.

H0 : Tidak Terdapat pengaruh Pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Dana Alokasi Khusus secara simultan terhadap Disparitas Pendapatan Regional di Provinsi Aceh.

Pada tabel 4.3 dapat diketahui bahwa nilai F-statistic dalam metode *Fixed Effect Model* sebesar 10,16273 dan nilai probabilitas sebesar 0,000000 lebih kecil dari  $\alpha = 0,10$ , sehingga dapat disimpulkan variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia dan dana alokasi khusus berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen yaitu disparitas pendapatan regional di Provinsi Aceh periode 2011 s/d 2022.

#### **4.6 Hasil Koefisien Determinasi (R)<sup>2</sup>**

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) menunjukkan besarnya persentase variasi seluruh variabel dependen yang dapat diterangkan oleh variabel dependen. Dalam penelitian ini memiliki tiga variabel independen antara lain pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan

manusia dan dana alokasi khusus. Pada tabel 4.4 dapat diketahui nilai estimasi  $R^2$  dalam *Random Effect Model* sebesar 0,5370 artinya sebesar 53,70% variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen yaitu disparitas pendapatan, sementara sisanya sebesar 56,30% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

## **4.7 Pembahasan Penelitian**

### **4.7.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PE) Terhadap Disparitas Pendapatan (DP) Regional Provinsi Aceh Periode 2011-2022.**

Hasil regresi pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Koefisien variabel pertumbuhan ekonomi sebesar -4,40 dengan probabilitas sebesar 0,3252 yang artinya jika pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1% berpengaruh namun tidak signifikan dan diikuti oleh penurunan ketimpangan distribusi pendapatan sebesar 4,40 persen.

Pendapatan tidak Berpengaruh terhadap disparitas pendapatan di Provinsi Aceh disebabkan karena kontribusi sektor-sektor pertumbuhan ekonomi kabupaten atau kota yang ada hanya berpusat di perkotaan dan kabupaten yang memiliki potensi sumber daya yang melimpah dan sedangkan daerah-daerah. Bagi kabupaten yang minim sumber daya hanya dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan jumlah kecil. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan kapasitas dalam

jangka panjang untuk menyediakan berbagai barang ekonomi bagi ekonomi bagi penduduknya (Todaro & Smith 2011) di tentukan secara bersama teori yang di kemukakan oleh kuznet dalam kurva U terbalik bahwa apabila pertumbuhan ekonomi stabil dalam jangka waktu tertentu maka disparitas akan menurun.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arif dan Agustin (2017) dan penelitian Gita dan Woyanti (2021) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap disparitas pendapatan, namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh Ananda dan Prabowo (2021) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap disparitas.

#### **4.7.2 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Disparitas Pendapatan (DP) Regional Provinsi Aceh Periode 2011-2022**

Hasil regresi menunjukkan bahwa secara parsial variabel IPM berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Koefisien variabel IPM sebesar 0.002 dengan probabilitas 0,001, artinya variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif terhadap jika IPM naik sebesar 1% atau akan diikuti dengan peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan sebesar 0,022650 persen. Hal ini di sebabkan karena berlaku di daerah-daerah yang tingkat indeks pembangunan yang tinggi dan juga pusat perekonomian, industri dan pemerintahan, terutama di daerah-daerah pusat industri atau daerah



yang memiliki berpendapatan tinggi dan rendah yang menyebabkan pertumbuhan tidak merata dan memicu disparitas ekonomi.

Berdasarkan teori *Human Capital* yang dikemukakan oleh Becker yang ditunjukkan dengan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Pendidikan memegang peranan penting dalam menentukan tingkat pendapatan seseorang. Dalam teori *Human Capital* juga dijelaskan bahwa setiap tambahan satu tahun sekolah dapat meningkatkan produktivitas kerja dan tingkat pendapatan seseorang.

Hasil ini didukung dengan Arif dan Wicaksana (2017) dan Gita dan Woyanti (2021) yang menyatakan bahwa hasil variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

#### **4.7.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Disparitas Pendapatan (DP) Regional Provinsi Aceh Periode 2011-2022**

Hasil regresi pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa secara parsial variabel DAK berpengaruh namun tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Koefisien variabel IPM sebesar 1,12 dengan probabilitas 0,1178, artinya variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Disparitas Pendapatan jika DAK naik sebesar 1 milyar maka akan diikuti dengan peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan sebesar 1,12 persen. Hasil ini memiliki persamaan yang dilakukan oleh Anisa (2019) yang dimana

DAK berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini disebabkan karena adanya pembagian dana alokasi khusus pada tiap kabupaten/kota yang berbeda-beda sesuai dengan potensi dan karakteristik kabupaten/kota dan ada juga tidak efektifnya pemerintah kabupaten/kota dalam penggunaan dan mengelola dana alokasi khusus.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data, maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel pertumbuhan ekonomi (X1) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pertumbuhan ekonomi dengan disparitas pendapatan regional di Provinsi Aceh periode 2011 s/d 2022. Nilai koefisien bernilai negatif, artinya pengaruh yang ditimbulkan adalah pengaruh negatif.
2. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (X2), menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Indeks Pembangunan manusia dengan disparitas pendapatan regional di Provinsi Aceh periode 2011 s/d 2022. Nilai koefisien bernilai positif, artinya pengaruh yang ditimbulkan adalah pengaruh positif.
3. Variabel Dana Alokasi Khusus (X3), menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel dana alokasi khusus dengan disparitas pendapatan regional di Provinsi Aceh periode 2011 s/d 2022. Nilai koefisien bernilai positif, artinya pengaruh yang ditimbulkan adalah pengaruh positif antara variabel dana alokasi khusus dengan disparitas pendapatan.

4. Variabel Pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Dana Alokasi Khusus secara simultan terhadap Disparitas Pendapatan, yang dimana nilai F-statistic dalam metode *Fixed Effect Model* sehingga dapat disimpulkan variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia dan dana alokasi khusus berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen yaitu disparitas pendapatan regional di Provinsi Aceh periode 2011 s/d 2022.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam proses mengendalikan tingkat disparitas pendapatan salah satunya adalah dengan mengoptimalkan sumber daya manusia. Bagi pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh harus dapat merealisasikan dan memfokuskan kebijakan untuk meningkatkan kualitas IPM sehingga kesejahteraan masyarakat Aceh lebih terjamin.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian tentang Disparitas Pendapatan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi disparitas pendapatan diantaranya pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia dan dana alokasi khusus. Peneliti berharap peneliti selanjutnya dapat menambah variabel lain dalam melakukan penelitian terkait yang mungkin memiliki

pengaruh yang lebih besar terhadap disparitas pendapatan, seperti belanja modal, dana alokasi umum, pemanfaatan sumber daya alam dan variabel-variabel lainnya yang tidak masuk ke dalam penelitian ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M., Marwiyati, & Jannah, R. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Di Provinsi Aceh. *JIMEBIS* 3(March), 1–6.
- Ananda, A. R., & Prabowo, P. S. (2021). Analisis Tipologi Wilayah dan Disparitas Pendapatan di Provinsi Jawa Timur. *INDEPENDENT: Journal Of Economics*, 1(2), 196–205. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/independent>
- Arif, M., & Agustin Wicaksana, R. (n.d.). Ketimpangan Pendapatan Propinsi Jawa Timur dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya.
- Azizi, M. (2018). Dampak Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Ketimpangan Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2005 – 2014. *JURNAL KRITIS (Kebijakan, Riset Dan Inovasi)*, 2(1),1–32. <https://www.ejournal.stiejb.ac.id/index.php/jurnalkritis/article/view/9>
- Basuki, & AT. (2017). Ekonometrika dan Aplikasinya di Bidang Ekonomi (*Dilengkapi dengan Aplikasi Eviews 7*). Danisa Media.

- Basuki, AT, & Prawoto, N. (2016). Analisis Regresi di Riset Ekonomi & Bisnis (*Lengkap dengan Aplikasi SPSS & Eviews*). Rajawali Pers.
- Davtyan, K. (2016). Interrelation among economic growth, income inequality, and fiscal performance: Evidence from anglo-saxon countries. *Hacienda Publica Espanola*, 217(2), 37–66. <https://doi.org/10.7866/HPE-RPE.16.2.2>
- Deyshappriya, N. P. R. (2017). Impact of Macroeconomic Factors on Income Inequality and Income Distribution in Asian Countries. *Asian Development Bank Institute*, 696, 1–16.
- Hariani, E. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di 38 Kabupaten/ Kota Jawa Timur Tahun 2012-2015. *The International Journal of Applied Business Tijab*, 3(1), 1–11.
- Khusaini. (2018). *Keuangan Daerah*. UB Press.
- Kusumawati, L., & Wiksuana, I. G. B. (2018). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(5), 2592. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v07.i05.p12>
- Laskiene, D., Pekarskiene, I., & Kontautiene, R. (2020). Regional income inequality in lithuania1. *Economy of Regions*, 16(4), 1104–1114. <https://doi.org/10.17059/EKON.REG.2020-4-7>

- Lee, J. W., & Lee, H. (2018). Human capital and income inequality\*. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 23(4), 554–583. <https://doi.org/10.1080/13547860.2018.1515002>
- Pradana, A. N., & Sumarsono, H. (2018). Human Development Index, Capital Expenditure, Fiscal Desentralization to Economic Growth and Income Inequality in East Java Indonesia. In *Quantitative Economics Research* (Vol. 1, Issue 2).
- Prawoto, N., & Cahyani, R. D. (2020). Analysis of unequal distribution of population income in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(7), 489–495. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no7.489>
- Sapaat, T. M. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun (2005-2019). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(03), 45–56.
- Sari, N., Harahap, I., & Tambunan, K. (2021). Transformasi Manageria Transformasi Manageria. *Journal Of Islamic Education Management*, 2(1), 57–72. <https://doi.org/10.47476/manageria.v3i2.3907>
- Sjafrijal. (2012). *Ekonomi wilayah dan perkotaan* (3rd ed.). Rajawali Pers.



- Soebagyo, D. (2016). *Perekonomian Indonesia: Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi dan Kajian Empiris*. CV. Jasmine.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*. CV. Alfabeta.
- Suhardi, D. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Investasi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Parepare. *Economos : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 31–43. <https://doi.org/10.31850/economos.v1i2.574>
- Sukirno, S. (2012). *Pengantar Teori Makroekonomi*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Suryani, K. G., & Woyanti, N. (2021). The Effect of Economic Growth, HDI, District/City Minimum Wage and Unemployment on Inequity of Income Distribution in Province of D.I Yogyakarta (2010-2018). *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 36(2), 170. <https://doi.org/10.24856/mem.v36i2.1990>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi* (11th ed.). Erlangga.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 *Common Effect Model* (CEM)

Dependent Variable: IG

Method: Panel Least Squares

Date: 08/15/23 Time: 21:54

Sample: 2011 2022

Periods included: 12

Cross-sections included: 23

Total panel (unbalanced) observations: 245

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.037888	0.161154	-0.235102	0.8143
LNPE	-2.25E-06	5.71E-06	-0.394405	0.6936
LNIPM	9.58E-05	3.53E-05	2.714037	0.0071
LNDAK	-1.67E-05	6.81E-06	-2.446132	0.0152
R-squared	0.068588	Mean dependent var		0.284233
Adjusted R-squared	0.056994	S.D. dependent var		0.038525
S.E. of regression	0.037411	Akaike info criterion		-3.717501
Sum squared resid	0.337303	Schwarz criterion		-3.660338
Log likelihood	459.3939	Hannan-Quinn criter.		-3.694482
F-statistic	5.915644	Durbin-Watson stat		0.778001
Prob(F-statistic)	0.000655			

## Lampiran 2 *Fixed Effect Model (FEM)*

Dependent Variable: IG  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 08/15/23 Time: 21:55  
 Sample: 2011 2022  
 Periods included: 12  
 Cross-sections included: 23  
 Total panel (unbalanced) observations: 245

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.807500	0.276795	-2.917320	0.0039
LNPE	-4.40E-06	4.47E-06	-0.986080	0.3252
LNIPM	0.000248	6.33E-05	3.913602	0.0001
LNDAK	1.12E-05	7.14E-06	1.570150	0.1178

### Effects Specification

#### Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.537065	Mean dependent var	0.284233
Adjusted R-squared	0.484218	S.D. dependent var	0.038525
S.E. of regression	0.027668	Akaike info criterion	-4.237024
Sum squared resid	0.167648	Schwarz criterion	-3.865461
Log likelihood	545.0354	Hannan-Quinn criter.	-4.087396
F-statistic	10.16273	Durbin-Watson stat	1.573528
Prob(F-statistic)	0.000000		

### Lampiran 3 *Random Effect Model (REM)*

Dependent Variable: IG

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 08/15/23 Time: 21:57

Sample: 2011 2022

Periods included: 12

Cross-sections included: 23

Total panel (unbalanced) observations: 245

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.570736	0.226457	-2.520281	0.0124
LNPE	-3.99E-06	4.43E-06	-0.900200	0.3689
LNIPM	0.000197	5.12E-05	3.849598	0.0002
LNDAK	6.00E-06	6.80E-06	0.881622	0.3789
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.025289	0.4552
Idiosyncratic random			0.027668	0.5448
Weighted Statistics				
R-squared	0.059181	Mean dependent var		0.090261
Adjusted R-squared	0.047470	S.D. dependent var		0.029341
S.E. of regression	0.027858	Sum squared resid		0.187028
F-statistic	5.053277	Durbin-Watson stat		1.384455
Prob(F-statistic)	0.002060			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.007332	Mean dependent var		0.284233
Sum squared resid	0.359487	Durbin-Watson stat		0.720282

## Lampiran 4 Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: Untitled  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	10.073697	(22,219)	0.0000
Cross-section Chi-square	171.282966	22	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: IG

Method: Panel Least Squares

Date: 08/15/23 Time: 21:56

Sample: 2011 2022

Periods included: 12

Cross-sections included: 23

Total panel (unbalanced) observations: 245

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.037888	0.161154	-0.235102	0.8143
LNPE	-2.25E-06	5.71E-06	-0.394405	0.6936
LNIPM	9.58E-05	3.53E-05	2.714037	0.0071
LNDK	-1.67E-05	6.81E-06	-2.446132	0.0152
R-squared	0.068588	Mean dependent var		0.284233
Adjusted R-squared	0.056994	S.D. dependent var		0.038525
S.E. of regression	0.037411	Akaike info criterion		-3.717501
Sum squared resid	0.337303	Schwarz criterion		-3.660338
Log likelihood	459.3939	Hannan-Quinn criter.		-3.694482
F-statistic	5.915644	Durbin-Watson stat		0.778001
Prob(F-statistic)	0.000655			

## Lampiran 5 Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	6.331491	3	0.0966

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LNPE	-0.000004	-0.000004	0.000000	0.4585
LNIPM	0.000248	0.000197	0.000000	0.1750
LNDAK	0.000011	0.000006	0.000000	0.0164

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: IG

Method: Panel Least Squares

Date: 08/15/23 Time: 21:58

Sample: 2011 2022

Periods included: 12

Cross-sections included: 23

Total panel (unbalanced) observations: 245

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.807500	0.276795	-2.917320	0.0039
LNPE	-4.40E-06	4.47E-06	-0.986080	0.3252
LNIPM	0.000248	6.33E-05	3.913602	0.0001
LNDAK	1.12E-05	7.14E-06	1.570150	0.1178

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.537065	Mean dependent var	0.284233
Adjusted R-squared	0.484218	S.D. dependent var	0.038525
S.E. of regression	0.027668	Akaike info criterion	-4.237024
Sum squared resid	0.167648	Schwarz criterion	-3.865461
Log likelihood	545.0354	Hannan-Quinn criter.	-4.087396

F-statistic	10.16273	Durbin-Watson stat	1.573528
Prob(F-statistic)	0.000000		

---



## Lampiran 6 Data Penelitian

Kab/Kota	Tahun	IG	PE	IPM	DAK (M)	LN PE	LN IPM	LN DAK
Simelue	2011	0,333	8,17	61,03	92,61	2,101	4,111	4,528
Simelue	2012	0,329	9,06	61,25	106,15	2,204	4,115	4,665
Simelue	2013	0,268	9,47	61,68	123,80	2,249	4,122	4,819
Simelue	2014	0,283	8,93	62,18	105,33	2,189	4,130	4,657
Simelue	2015	0,355	8,13	63,16	108,49	2,095	4,146	4,687
Simelue	2016	0,268	8,08	63,82	106,48	2,089	4,156	4,668
Simelue	2017	0,307	7,02	64,41	129,99	1,949	4,165	4,867
Simelue	2018	0,343	7,69	64,74	86,61	2,039	4,170	4,461
Simelue	2019	0,340	8,28	65,70	79,40	2,113	4,185	4,375
Simelue	2020	0,296	2,82	66,03	96,14	1,038	4,190	4,566
Simelue	2021	0,310	7,28	66,41	74,56	1,985	4,196	4,312
Simelue	2022	0,279	8,63	67,27	82,07	2,155	4,209	4,408
Aceh Singkil	2011	0,243	9,40	61,03	102,34	2,240	4,111	4,628
Aceh Singkil	2012	0,228	8,97	61,25	116,77	2,194	4,115	4,760
Aceh Singkil	2013	0,276	8,30	61,68	130,74	2,116	4,122	4,873
Aceh Singkil	2014	0,314	7,84	62,18	113,75	2,060	4,130	4,734
Aceh Singkil	2015	0,334	7,73	63,16	116,34	2,045	4,146	4,756
Aceh Singkil	2016	0,307	9,04	66,96	116,38	2,202	4,204	4,757
Aceh Singkil	2017	0,321	7,36	67,37	118,14	1,996	4,210	4,772
Aceh Singkil	2018	0,336	6,05	64,74	10,69	1,801	4,170	2,370
Aceh Singkil	2019	0,282	6,22	68,91	97,39	1,827	4,233	4,579
Aceh Singkil	2020	0,287	1,14	68,94	97,55	0,127	4,233	4,580
Aceh Singkil	2021	0,337	11,57	69,22	75,75	2,448	4,237	4,327
Aceh Singkil	2022	0,296	10,42	69,62	77,23	2,343	4,243	4,347
Aceh Selatan	2011	0,272	9,06	61,52	122,20	2,204	4,119	4,806
Aceh Selatan	2012	0,274	7,91	61,69	141,11	2,068	4,122	4,950
Aceh Selatan	2013	0,240	9,48	62,27	180,66	2,249	4,131	5,197
Aceh Selatan	2014	0,261	7,75	62,35	158,15	2,047	4,133	5,064
Aceh Selatan	2015	0,311	7,57	63,28	156,73	2,025	4,148	5,055
Aceh Selatan	2016	0,313	7,72	64,13	154,99	2,044	4,161	5,043
Aceh Selatan	2017	0,321	6,61	65,03	176,92	1,889	4,175	5,176



Aceh Selatan	2018	0,312	7,05	65,92	135,95	1,953	4,188	4,912
Aceh Selatan	2019	0,273	5,43	66,90	122,22	1,692	4,203	4,806
Aceh Selatan	2020	0,313	0,94	67,12	133,79	-0,065	4,206	4,896
Aceh Selatan	2021	0,295	7,78	67,44	104,05	2,052	4,211	4,645
Aceh Selatan	2022	0,257	7,81	67,87	108,49	2,055	4,218	4,687
Aceh Tenggara	2011	0,249	10,36	64,27	119,63	2,338	4,163	4,784
Aceh Tenggara	2012	0,235	8,23	64,99	144,03	2,108	4,174	4,970
Aceh Tenggara	2013	0,213	9,31	65,55	183,29	2,231	4,183	5,211
Aceh Tenggara	2014	0,246	8,57	65,90	162,41	2,149	4,188	5,090
Aceh Tenggara	2015	0,302	7,65	66,77	194,83	2,034	4,201	5,272
Aceh Tenggara	2016	0,317	8,86	67,48	163,80	2,182	4,212	5,099
Aceh Tenggara	2017	0,284	9,32	68,09	175,10	2,232	4,221	5,165
Aceh Tenggara	2018	0,295	7,39	68,67	176,90	2,000	4,229	5,176
Aceh Tenggara	2019	0,278	7,64	69,36	130,06	2,033	4,239	4,868
Aceh Tenggara	2020	0,315	3,09	69,37	131,51	1,128	4,239	4,879
Aceh Tenggara	2021	0,247	6,78	69,44	102,43	1,914	4,240	4,629
Aceh Tenggara	2022	0,274	7,63	70,32	108,03	2,032	4,253	4,682
Aceh Timur	2011	0,229	5,56	62,35	168,91	1,715	4,133	5,129
Aceh Timur	2012	0,254	5,12	62,93	203,32	1,633	4,142	5,315
Aceh Timur	2013	0,242	4,26	63,27	229,57	1,449	4,147	5,436
Aceh Timur	2014	0,243	3,10	63,57	204,54	1,131	4,152	5,321
Aceh Timur	2015	0,320	5,74	64,55	203,30	1,748	4,167	5,315
Aceh Timur	2016	0,243	3,83	65,42	204,30	1,343	4,181	5,320
Aceh Timur	2017	0,265	6,99	66,32	252,51	1,945	4,194	5,531
Aceh Timur	2018	0,272	6,38	66,82	190,86	1,853	4,202	5,252
Aceh Timur	2019	0,249	6,14	67,39	201,83	1,815	4,210	5,307
Aceh Timur	2020	0,282	3,16	67,63	162,91	1,151	4,214	5,093
Aceh Timur	2021	0,271	9,87	67,83	126,11	2,290	4,217	4,837
Aceh Timur	2022	0,283	11,64	68,72	131,97	2,454	4,230	4,883
Aceh Tengah	2011	0,245	8,40	70,00	119,35	2,128	4,248	4,782
Aceh Tengah	2012	0,296	7,85	70,18	135,80	2,061	4,251	4,911
Aceh Tengah	2013	0,307	9,24	70,51	171,80	2,223	4,256	5,146
Aceh Tengah	2014	0,293	7,71	70,96	151,55	2,043	4,262	5,021

Aceh Tengah	2015	0,299	7,55	71,51	153,03	2,022	4,270	5,031
Aceh Tengah	2016	0,310	7,36	72,04	155,58	1,995	4,277	5,047
Aceh Tengah	2017	0,238	6,57	72,19	166,83	1,883	4,279	5,117
Aceh Tengah	2018	0,260	6,79	72,64	125,49	1,915	4,286	4,832
Aceh Tengah	2019	0,256	4,10	73,14	120,60	1,411	4,292	4,792
Aceh Tengah	2020	0,331	1,14	73,24	130,85	0,130	4,294	4,874
Aceh Tengah	2021	0,290	8,27	73,37	102,04	2,112	4,296	4,625
Aceh Tengah	2022	0,270	10,37	73,95	109,53	2,339	4,303	4,696
Aceh Barat	2011	0,254	4,73	66,47	96,85	1,553	4,197	4,573
Aceh Barat	2012	0,297	1,52	66,66	118,18	0,417	4,200	4,772
Aceh Barat	2013	0,301	6,52	66,86	137,81	1,875	4,203	4,926
Aceh Barat	2014	0,310	8,23	67,31	126,03	2,108	4,209	4,837
Aceh Barat	2015	0,355	6,57	68,41	125,45	1,883	4,226	4,832
Aceh Barat	2016	0,325	6,11	69,26	120,03	1,809	4,238	4,788
Aceh Barat	2017	0,333	12,33	70,20	145,17	2,512	4,251	4,978
Aceh Barat	2018	0,276	10,73	70,47	120,93	2,373	4,255	4,795
Aceh Barat	2019	0,330	3,53	71,22	106,19	1,262	4,266	4,665
Aceh Barat	2020	0,304	1,82	71,38	117,48	0,598	4,268	4,766
Aceh Barat	2021	0,295	23,18	71,67	91,34	3,143	4,272	4,515
Aceh Barat	2022	0,265	33,62	72,34	96,74	3,515	4,281	4,572
Aceh Besar	2011	0,294	6,74	69,94	111,97	1,909	4,248	4,718
Aceh Besar	2012	0,325	7,40	70,10	138,33	2,001	4,250	4,930
Aceh Besar	2013	0,296	9,55	70,61	164,97	2,257	4,257	5,106
Aceh Besar	2014	0,289	8,49	71,06	148,68	2,139	4,264	5,002
Aceh Besar	2015	0,308	7,02	71,70	147,91	1,949	4,272	4,997
Aceh Besar	2016	0,292	6,22	71,75	145,49	1,827	4,273	4,980
Aceh Besar	2017	0,291	6,10	72,00	165,69	1,808	4,277	5,110
Aceh Besar	2018	0,306	6,94	72,73	127,87	1,938	4,287	4,851
Aceh Besar	2019	0,288	6,39	73,55	120,32	1,855	4,298	4,790
Aceh Besar	2020	0,352	0,67	73,56	138,43	-0,406	4,298	4,930
Aceh Besar	2021	0,296	5,20	73,58	107,57	1,648	4,298	4,678
Aceh Besar	2022	0,293	9,69	74,00	115,78	2,272	4,304	4,752
Pidie	2011	0,193	7,51	66,95	118,71	2,016	4,204	4,777

Pidie	2012	0,214	8,07	67,30	134,41	2,088	4,209	4,901
Pidie	2013	0,205	8,59	67,59	176,07	2,150	4,213	5,171
Pidie	2014	0,234	7,91	67,87	160,63	2,068	4,218	5,079
Pidie	2015	0,267	8,37	68,68	154,83	2,124	4,229	5,042
Pidie	2016	0,268	7,99	69,06	152,72	2,078	4,235	5,029
Pidie	2017	0,305	8,21	69,52	174,18	2,106	4,242	5,160
Pidie	2018	0,262	7,70	69,93	139,95	2,042	4,247	4,941
Pidie	2019	0,249	6,62	70,41	152,92	1,889	4,254	5,030
Pidie	2020	0,249	1,99	70,63	146,55	0,686	4,257	4,987
Pidie	2021	0,220	5,20	70,70	113,89	1,648	4,258	4,735
Pidie	2022	0,223	9,34	71,20	120,30	2,235	4,265	4,790
Bireun	2011	0,256	7,55	67,03	101,22	2,022	4,205	4,617
Bireun	2012	0,265	7,57	67,57	124,06	2,025	4,213	4,821
Bireun	2013	0,289	7,68	68,23	148,55	2,039	4,223	5,001
Bireun	2014	0,288	5,79	68,71	132,24	1,756	4,230	4,885
Bireun	2015	0,322	7,21	69,77	126,66	1,975	4,245	4,841
Bireun	2016	0,279	6,52	70,21	126,20	1,875	4,251	4,838
Bireun	2017	0,315	6,39	71,11	144,75	1,854	4,264	4,975
Bireun	2018	0,305	5,97	71,37	119,27	1,787	4,268	4,781
Bireun	2019	0,295	6,57	72,27	104,61	1,882	4,280	4,650
Bireun	2020	0,304	1,53	72,28	135,87	0,427	4,281	4,912
Bireun	2021	0,296	7,41	72,33	105,77	2,003	4,281	4,661
Bireun	2022	0,275	9,68	73,16	112,41	2,270	4,293	4,722
Aceh Utara	2011	0,251	9,28	64,22	123,03	2,227	4,162	4,812
Aceh Utara	2012	0,314	5,06	64,82	138,77	1,621	4,172	4,933
Aceh Utara	2013	0,217	1,69	65,36	177,23	0,527	4,180	5,177
Aceh Utara	2014	0,250	0,70	65,93	136,33	-0,360	4,189	4,915
Aceh Utara	2015	0,271	18,06	66,85	132,38	2,894	4,202	4,886
Aceh Utara	2016	0,270	2,18	67,19	129,52	0,778	4,208	4,864
Aceh Utara	2017	0,266	4,83	67,67	178,69	1,575	4,215	5,186
Aceh Utara	2018	0,292	7,50	68,36	130,52	2,015	4,225	4,872
Aceh Utara	2019	0,308	4,57	69,22	124,62	1,519	4,237	4,825
Aceh Utara	2020	0,261	0,14	69,33	158,87	-1,961	4,239	5,068

Aceh Utara	2021	0,283	17,71	69,46	123,44	2,874	4,241	4,816
Aceh Utara	2022	0,275	20,80	70,22	130,03	3,035	4,252	4,868
Aceh Barat Daya	2011	0,258	6,79	61,75	94,47	1,916	4,123	4,548
Aceh Barat Daya	2012	0,240	4,67	62,15	107,87	1,542	4,130	4,681
Aceh Barat Daya	2013	0,251	5,68	62,62	128,14	1,737	4,137	4,853
Aceh Barat Daya	2014	0,262	5,20	63,08	111,02	1,649	4,144	4,710
Aceh Barat Daya	2015	0,271	6,77	63,77	111,44	1,913	4,155	4,713
Aceh Barat Daya	2016	0,276	6,96	64,57	111,68	1,940	4,168	4,716
Aceh Barat Daya	2017	0,246	6,91	65,09	126,40	1,934	4,176	4,839
Aceh Barat Daya	2018	0,286	7,09	65,67	108,01	1,959	4,185	4,682
Aceh Barat Daya	2019	0,301	6,03	66,56	104,62	1,797	4,198	4,650
Aceh Barat Daya	2020	0,273	1,64	66,75	108,26	0,493	4,201	4,684
Aceh Barat Daya	2021	0,282	5,55	66,99	84,31	1,714	4,205	4,434
Aceh Barat Daya	2022	0,240	9,66	67,41	87,20	2,268	4,211	4,468
Gayo Lues	2011	0,247	9,41	61,91	147,60	2,241	4,126	4,995
Gayo Lues	2012	0,250	9,43	62,85	168,06	2,244	4,141	5,124
Gayo Lues	2013	0,259	8,10	63,22	187,73	2,092	4,147	5,235
Gayo Lues	2014	0,284	7,55	63,34	195,02	2,021	4,149	5,273
Gayo Lues	2015	0,301	7,32	63,67	200,86	1,991	4,154	5,303
Gayo Lues	2016	0,308	7,62	64,26	198,09	2,030	4,163	5,289
Gayo Lues	2017	0,301	8,59	65,01	212,14	2,150	4,175	5,357
Gayo Lues	2018	0,315	5,12	65,88	162,06	1,634	4,188	5,088
Gayo Lues	2019	0,290	2,31	66,87	161,93	0,836	4,203	5,087
Gayo Lues	2020	0,280	3,24	67,22	129,40	1,176	4,208	4,863
Gayo Lues	2021	0,264	5,92	67,56	100,88	1,778	4,213	4,614
Gayo Lues	2022	0,254	7,52	68,25	105,27	2,017	4,223	4,657
Aceh Tamiang	2011	0,244	4,73	64,89	91,57	1,554	4,173	4,517
Aceh Tamiang	2012	0,228	6,25	65,21	107,65	1,832	4,178	4,679
Aceh Tamiang	2013	0,214	9,26	65,56	146,90	2,226	4,183	4,990
Aceh Tamiang	2014	0,260	5,42	66,09	133,95	1,689	4,191	4,897
Aceh Tamiang	2015	0,275	2,04	67,03	126,83	0,715	4,205	4,843
Aceh Tamiang	2016	0,332	5,21	67,41	133,12	1,651	4,211	4,891
Aceh Tamiang	2017	0,295	7,50	67,99	149,38	2,015	4,219	5,007

Aceh Tamiang	2018	0,328	7,26	68,45	119,61	1,982	4,226	4,784
Aceh Tamiang	2019	0,289	5,63	69,23	112,23	1,729	4,237	4,721
Aceh Tamiang	2020	0,264	1,72	69,24	123,92	0,545	4,238	4,820
Aceh Tamiang	2021	0,276	17,90	69,48	96,58	2,885	4,241	4,570
Aceh Tamiang	2022	0,305	16,62	70,43	101,47	2,811	4,255	4,620
Nagan Raya	2011	0,228	6,53	64,24	110,91	1,877	4,163	4,709
Nagan Raya	2012	0,219	1,74	64,91	136,28	0,557	4,173	4,915
Nagan Raya	2013	0,226	3,98	65,23	146,71	1,381	4,178	4,988
Nagan Raya	2014	0,278	5,85	65,58	145,83	1,767	4,183	4,982
Nagan Raya	2015	0,274	5,84	66,73	145,85	1,765	4,201	4,983
Nagan Raya	2016	0,282	6,65	67,32	140,10	1,895	4,209	4,942
Nagan Raya	2017	0,231	6,68	67,78	183,47	1,900	4,216	5,212
Nagan Raya	2018	0,284	5,40	68,15	163,93	1,687	4,222	5,099
Nagan Raya	2019	0,252	7,01	69,11	128,96	1,947	4,236	4,859
Nagan Raya	2020	0,275	3,30	69,18	121,27	1,195	4,237	4,798
Nagan Raya	2021	0,257	19,94	69,31	94,37	2,993	4,239	4,547
Nagan Raya	2022	0,236	23,29	70,10	98,91	3,148	4,250	4,594
Aceh Jaya	2011	0,230	7,26	65,17	117,76	1,983	4,177	4,769
Aceh Jaya	2012	0,283	5,35	66,42	138,68	1,677	4,196	4,932
Aceh Jaya	2013	0,268	6,25	66,92	175,26	1,833	4,203	5,166
Aceh Jaya	2014	0,305	7,63	67,30	152,47	2,032	4,209	5,027
Aceh Jaya	2015	0,340	7,72	67,53	158,43	2,043	4,213	5,065
Aceh Jaya	2016	0,305	6,83	67,70	155,56	1,922	4,215	5,047
Aceh Jaya	2017	0,287	7,51	68,07	163,83	2,016	4,221	5,099
Aceh Jaya	2018	0,264	6,78	68,83	129,91	1,914	4,232	4,867
Aceh Jaya	2019	0,253	6,01	69,74	125,59	1,793	4,245	4,833
Aceh Jaya	2020	0,252	1,96	69,75	115,61	0,675	4,245	4,750
Aceh Jaya	2021	0,312	8,59	69,84	89,89	2,151	4,246	4,499
Aceh Jaya	2022	0,299	9,31	70,36	94,50	2,231	4,254	4,549
Bener Meriah	2011	0,247	8,22	68,24	72,80	2,106	4,223	4,288
Bener Meriah	2012	0,234	8,18	69,14	83,71	2,101	4,236	4,427
Bener Meriah	2013	0,225	8,22	69,74	106,85	2,106	4,245	4,671
Bener Meriah	2014	0,243	8,01	70,00	94,22	2,080	4,248	4,546

Bener Meriah	2015	0,275	7,19	70,62	96,64	1,972	4,257	4,571
Bener Meriah	2016	0,283	7,10	71,42	94,65	1,960	4,269	4,550
Bener Meriah	2017	0,213	5,15	71,89	98,26	1,639	4,275	4,588
Bener Meriah	2018	0,254	5,10	72,14	94,24	1,629	4,279	4,546
Bener Meriah	2019	0,267	5,26	72,97	88,82	1,660	4,290	4,487
Bener Meriah	2020	0,259	2,37	72,98	100,16	0,862	4,290	4,607
Bener Meriah	2021	0,255	9,52	73,27	77,74	2,254	4,294	4,353
Bener Meriah	2022	0,257	9,84	73,90	88,96	2,287	4,303	4,488
Pidie Jaya	2011	0,283	7,86	68,69	80,66	2,062	4,230	4,390
Pidie Jaya	2012	0,220	7,61	68,90	95,56	2,029	4,233	4,560
Pidie Jaya	2013	0,243	8,22	69,26	125,68	2,106	4,238	4,834
Pidie Jaya	2014	0,225	7,69	69,89	109,24	2,040	4,247	4,694
Pidie Jaya	2015	0,238	8,79	70,49	111,92	2,173	4,255	4,718
Pidie Jaya	2016	0,249	6,62	71,13	111,03	1,890	4,265	4,710
Pidie Jaya	2017	0,220	8,75	71,73	127,37	2,169	4,273	4,847
Pidie Jaya	2018	0,233	7,56	71,12	108,72	2,022	4,264	4,689
Pidie Jaya	2019	0,236	6,46	72,87	102,54	1,865	4,289	4,630
Pidie Jaya	2020	0,227	1,46	73,20	106,95	0,381	4,293	4,672
Pidie Jaya	2021	0,236	4,84	73,60	83,26	1,576	4,299	4,422
Pidie Jaya	2022	0,231	8,14	74,34	83,35	2,096	4,309	4,423
Banda Aceh	2011	0,306	6,89	80,87	62,04	1,930	4,39	4,128
Banda Aceh	2012	0,327	7,61	81,30	71,23	2,029	4,398	4,266
Banda Aceh	2013	0,285	8,59	81,84	85,55	2,150	4,405	4,449
Banda Aceh	2014	0,288	7,43	82,22	112,55	2,005	4,409	4,723
Banda Aceh	2015	0,328	7,35	83,25	117,11	1,995	4,422	4,763
Banda Aceh	2016	0,308	9,01	83,73	117,58	2,198	4,428	4,767
Banda Aceh	2017	0,314	5,62	83,95	128,84	1,727	4,430	4,859
Banda Aceh	2018	0,294	5,58	84,37	80,76	1,719	4,435	4,391
Banda Aceh	2019	0,289	5,39	85,07	74,89	1,684	4,443	4,316
Banda Aceh	2020	0,303	0,36	85,41	138,97	-1,013	4,447	4,934
Banda Aceh	2021	0,347	7,73	85,71	108,20	2,046	4,451	4,684
Banda Aceh	2022	0,391	8,15	86,28	121,40	2,098	4,458	4,799
Sabang	2011	0,238	7,69	70,15	49,20	2,041	4,251	3,896

Sabang	2012	0,267	6,72	70,84	57,42	1,905	4,260	4,050
Sabang	2013	0,305	7,46	71,07	68,86	2,009	4,264	4,232
Sabang	2014	0,285	7,65	71,50	60,21	2,035	4,270	4,098
Sabang	2015	0,271	7,91	72,51	62,33	2,068	4,284	4,132
Sabang	2016	0,299	8,26	73,36	61,35	2,111	4,295	4,117
Sabang	2017	0,247	9,84	74,10	74,74	2,287	4,305	4,314
Sabang	2018	0,277	9,85	74,82	78,12	2,287	4,315	4,358
Sabang	2019	0,281	9,57	75,77	73,93	2,259	4,328	4,303
Sabang	2020	0,271	0,01	75,78	81,85	-4,444	4,328	4,405
Sabang	2021	0,293	4,17	76,11	63,58	1,428	4,332	4,152
Sabang	2022	0,298	2,63	76,85	69,56	0,967	4,342	4,242
Langsa	2011	0,372	7,48	72,15	63,14	2,012	4,279	4,145
Langsa	2012	0,336	7,78	72,75	76,62	2,051	4,287	4,339
Langsa	2013	0,339	8,48	73,40	90,18	2,138	4,296	4,502
Langsa	2014	0,337	8,63	73,81	81,67	2,155	4,301	4,403
Langsa	2015	0,356	8,78	74,74	81,93	2,172	4,314	4,406
Langsa	2016	0,359	8,84	75,41	80,68	2,179	4,323	4,390
Langsa	2017	0,342	7,61	75,89	92,17	2,030	4,329	4,524
Langsa	2018	0,356	7,38	76,34	87,28	1,999	4,335	4,469
Langsa	2019	0,363	7,45	77,16	78,04	2,008	4,346	4,357
Langsa	2020	0,356	0,72	77,17	95,75	-0,326	4,346	4,562
Langsa	2021	0,340	9,63	77,44	74,61	2,264	4,350	4,312
Langsa	2022	0,368	8,04	77,82	81,74	2,084	4,354	4,403
Lhokseumawe	2011	0,301	0,45	72,35	61,48	-0,792	4,282	4,119
Lhokseumawe	2012	0,454	3,00	73,55	71,69	1,097	4,298	4,272
Lhokseumawe	2013	0,322	2,76	74,13	84,16	1,016	4,306	4,433
Lhokseumawe	2014	0,334	2,69	74,44	73,73	0,989	4,310	4,300
Lhokseumawe	2015	0,324	18,08	75,11	73,90	2,895	4,319	4,303
Lhokseumawe	2016	0,291	1,22	75,78	73,74	0,199	4,328	4,300
Lhokseumawe	2017	0,291	4,42	76,34	87,94	1,485	4,335	4,477
Lhokseumawe	2018	0,305	4,79	76,62	86,61	1,566	4,339	4,461
Lhokseumawe	2019	0,306	5,22	77,30	79,40	1,653	4,348	4,375
Lhokseumawe	2020	0,307	0,35	77,31	96,14	-1,051	4,348	4,566

Lhokseumawe	2021	0,296	6,26	77,57	74,56	1,834	4,351	4,312
Lhokseumawe	2022	0,348	8,94	78,04	82,07	2,190	4,357	4,408
Subulussalam	2011	0,249	7,10	59,34	81,41	1,960	4,083	4,400
Subulussalam	2012	0,281	7,26	59,76	90,70	1,982	4,090	4,508
Subulussalam	2013	0,322	7,64	60,11	115,25	2,033	4,096	4,747
Subulussalam	2014	0,300	7,72	60,39	104,80	2,043	4,101	4,652
Subulussalam	2015	0,373	7,84	61,32	104,16	2,059	4,116	4,646
Subulussalam	2016	0,329	8,14	62,18	105,71	2,096	4,130	4,661
Subulussalam	2017	0,330	9,64	62,88	116,40	2,266	4,141	4,757
Subulussalam	2018	0,291	5,69	63,48	10,69	1,739	4,151	2,370
Subulussalam	2019	0,342	6,41	64,46	97,39	1,858	4,166	4,579
Subulussalam	2020	0,344	4,44	64,93	97,55	1,492	4,173	4,580
Subulussalam	2021	0,303	17,70	65,27	75,75	2,873	4,179	4,327
Subulussalam	2022	0,330	9,74	66,2	77,23	2,276	4,193	4,347

